

**ANALISIS SEKTOR BASIS DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH
STUDI KASUS : KABUPATEN KABUPATEN
DI JAWA TENGAH TAHUN 1996 - 2001**



TESIS
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S2

Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Binar Rudatin
C4B 000184

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

Juni
2003

UPT-PUSTAKA-UNWIP

TESIS

ANALISIS SEKTOR BASIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH STUDI KASUS : KABUPATEN-KABUPATEN DI JAWA TENGAH TAHUN 1996 – 2001

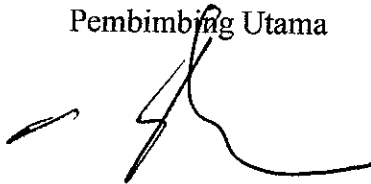
Disusun Oleh:

Binar Rudatin
NIM : C4B 000 184

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 20 Juni 2003
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat.

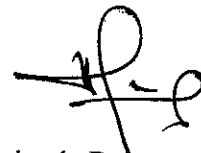
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Miyasto, SU

Anggota Penguji



Dr. Dwisetia Poerwono, MSc.

Pembimbing Pendamping

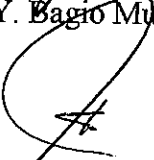


Drs. Edi Yusuf AG, MSc

Drs. Y. Bagio Mudakir, MT



Hadi Sasana, SE, MSi.



Semarang,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

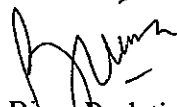


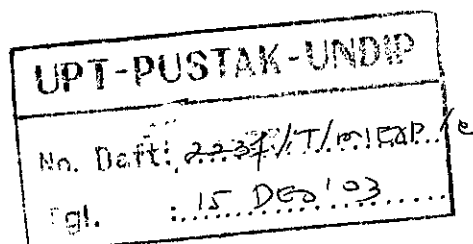
Drs. Budiningharto, SU

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pejerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya . Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 10 Juni 2003


Binar Rudatin



ABSTRACT

The aims of this research is to identify and to analysis any potentials factor, competitive advantages and specialize sectors, and typology of area in the entire area of the Central Java regency between 1996- 2001 that will be used for the development purpose in Central Java and any related areas especially in relation to the implementation of local autonomy.

Any data that used in this research is the secondary data that gained from a period of time between 1996 and 2001 that recorded in Central Java Statistical Center Department, Regency Statistical Center Department, and Central Java Planner Development Department. Analysis mode is resulted by LQ analysis, Shift-Share Analysis and Typology of Klassen.

Based on the research report, it found that each of regency have own potential sectors that accordance to every own condition. Some districk where consist of agriculture sector, monetary sector, organization service and service sector.

From 9 sector have been researched, only exploration and drilling sectors that have no competitive advantages. In contrast, agriculture and trade off sectors, hotel, and restaurant that have own specialization. Even though industrial sector do not have specialization, but they can provide largely contributions.

For the area typology in Central java, from 29 regencies that has been observed, two of them is high growth and high income areas , only four that to be High income but low growth areas, nine of them said high growth but low income areas, and rest 14 regencies that called low growth and low income areas.

Based on the LQ analysis result, Shift-Share and area typology, it can be decided any sectors that should become priority in every single area to the development of the Central Java or in any regencies in the Central Java.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sektor – sektor yang potensial , keunggulan kompetitif dan spesialisasi sektor – sektor yang ada serta tipologi daerah di seluruh kabupaten di Jawa Tengah dalam kurun waktu 1996 – 2001 yang akan digunakan untuk pengembangan pembangunan di Jawa Tengah umumnya dan di masing- masing kabupaten khususnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas data runtut waktu (1996 – 2001) yang diperoleh di Kantor Biro Pusat Statistik Jawa Tengah, Kantor Biro Pusat Statistik Kabupaten dan Bappeda propinsi Jawa Tengah . Model analisis yang digunakan adalah analisis LQ, Analisis Shift – share dan Klassen Tipologi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masing- masing kabupaten mempunyai sektor potensial sendiri – sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing. Sebagian besar kabupaten (22 Kabupaten) mempunyai sektor basis Sektor Pertanian , sektor keuangan sewa dan jasa perusahaan dan sektor Jasa. Namun yang mempunyai sektor basis sektor industri dan Sektor perdagangan hanya 6 kabupaten

Dari 9 sektor yang diteliti hanya sektor pertambangan dan penggalian yang tidak mempunyai keunggulan kompetitif namun hanya sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran saja yang mempunyai spesialisasi. Walaupun sektor industri tidak mempunyai spesialisasi namun sektor ini memberikan kontribusi yang paling banyak.

Untuk tipologi Daerah di Jawa Tengah dari 29 Kabupaten yang diteliti , 2 kabupaten yang merupakan daerah maju dan cepat tumbuh, 4 kabupaten yang merupakan daerah maju tapi tertekan, 9 kabupaten merupakan daerah berkembang cepat dan 14 kabupaten merupakan daerah relatif tertinggal.

Dari hasil analisis LQ, Shift- Share , Tipologi Daerah dapat ditentukan sektor – sektor yang dapat diunggulkan di masing- masing daerah untuk pemilihan prioritas sektor basis sebagai salah satu dasar pengembangan pembangunan yang akan dilaksanakan . Baik untuk Tingkat Jawa Tengah maupun untuk tingkat Kabupaten.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan Hidayahnya kepada penyusun , sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : *Analisis sektor Basis dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah . Studi Kasus : kabupaten – kabupaten di Jawa Tengah Tahun 1996 – 2001.*

Penulisan penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tesis dalam menempuh program studi strata dua (S2) program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang se tulus – tulusnya kepada :

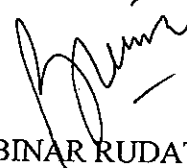
1. Bapak Dr. Safrudin Budiningharto, SU selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UNDIP.
2. Bapak Prof. Dr. Miyasto SU selaku pembimbing utama yang telah dengan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta dorongan semangat kepada penulis sehingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Bapak Drs. Edi Yusuf AG, MSc selaku pembimbing kedua yang juga dengan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta dorongan semangat kepada penulis sehingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Bapak Gubernur Propinsi Jawa Tengah dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan dan pendanaan kepada penulis untuk melanjutkan studi di MIESP – UNDIP Semarang.

5. Kedua Orang Tuaku, Suamiku, Anak- anakku , Sahabat- sahabatku, teman – teman MIESP II yang telah memberikan bantuan , dorongan kritik dan saran dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak mengandung keterbatasan. Oleh karena itu penulis terbuka bagi semua pihak yang bermaksud menyempurnakan tesis ini. Akhirnya penulis menaruh harapan besar bahwa tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Semarang, 10 Juni 2002

Penulis



BINAR RUDATIN.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRACT.....	iv
INTISARI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 BAB. I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang masalah.....	1
1.2. Perumusan masalah.....	8
1.3. Tujuan dan manfaat penelitian.....	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Manfaat Penelitian	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
TEORITIS	11
2.1. Teori Basis Ekonomi.....	11
2.2 Analisis Shift- Share.....	15
2.3 Tipologi ekonomi regional.....	18
2.4 Penelitian – penelitian terdahulu.....	20
2.5 Kerangka pemikiran teoritis.....	22
2.6. Definisi Operasional.....	25
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 29
3.1 Jenis dan sumber data.....	29
3.2. Metode pengumpulan data.....	30

3.3. Metode Analisis.....	30
3.3. 1. Metode LQ.....	30
3.3. 2. Metode analisis Shift – share.....	31
3.3. 3. Penentuan Tipologi Daerah.....	34
3.5. menentukan prioritas sektor basis untuk pengembangan pembangunan di Kabupaten dan Propinsi Jawa Tengah	35
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	36
4.1. Geografis.....	36
4.2. Demografis.....	37
4.3. Tenaga Kerja.....	39
4.4. Kondisi perekonomian Jawa Tengah.....	41
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
5.1. Sektor – sektor basis di masing- masing Kabupaten	47
5.1.1. Sektor Pertanian.....	47
5.1.2. Sektor Pertambangan dan penggalian.....	49
5.1.3. Sektor Industri.....	51
5.1.4. Sektor Listrik, gas dan Air Bersih.....	52
5.1.5. Sektor Bangunan.....	54
5.1.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran.....	55
5.1.7. Sektor Pengangkutan dan komunikasi.....	57
5.1.8. Sektor keuangan, Sewa dan jasa Perusahaan	58
5.1.9. Sektor Jasa – jasa	60
5.2. Analisis kinerja sektor sektor perekonomian terutama untuk sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi.....	63
5.2.1. Sektor Pertanian.....	63
5.2.2. Sektor Pertambangan dan penggalian.....	65
5.2.3. Sektor Industri.....	66
5.2.4. Sektor Listrik, gas dan Air Bersih.....	68
5.2.5. Sektor Bangunan.....	69
5.2.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran.....	71
5.2.7. Sektor Pengangkutan dan komunikasi.....	72

5.2.8.Sektor keuangan, Sewa dan jasa Perusahaan	74
5.2.9.Sektor Jasa – jasa	75
5.3. Tipologi Daerah.....	83
5.4. Prioritas Wilayah sektor basis untuk pengembangan pembangunan.....	85
5.4.1. Sektor Pertanian.....	86
5.4.2. Sektor Pertambangan dan penggalian.....	87
5.4.3. Sektor Industri.....	88
5.4.4. Sektor Listrik, gas dan Air Bersih.....	88
5.4.5.Sektor Bangunan.....	89
5.4.6.Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran.....	90
5.4.7. Sektor Pengangkutan dan komunikasi.....	91
5.4.8.Sektor keuangan, Sewa dan jasa Perusahaan	92
5.4.9.Sektor Jasa – jasa	93
BAB VI PENUTUP.....	97
6.1. Kesimpulan.....	97
6.2. Keterbatasan.....	100
6.3. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	106
BIODATA.....	160

DAFTAR TABEL.

	Halaman
Tabel 1.1. Perbandingan jumlah penduduk, luas daerah, PDRB percapita dan PDRB Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat tahun 1996 dan 2001.	4
Tabel 1.2. PDRB atas dasar harga konstan 1993 dan laju pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/Kota tahun 1996 – 2001.....	6
Tabel 2.1. Penelitian terdahulu.....	20
Tabel 4.1. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001.....	38
Tabel 4.2. Jumlah Angkatan Kerja di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 menurut Kabupaten dan kota.....	40
Tabel 4.3. Laju pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993, Propinsi Jawa Tengah Tahun 1996 – 2001 (persen).....	42
Tabel 4.4. PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Daerah Kabupaten/ Kota Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Propinsi Jawa Tengah.....	44
Tabel 4.5. Struktur Ekonomi Jawa Tengah Tahun 1996-2001 Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Persen).....	46
Tabel 5.1. Hasil perhitungan LQ tiap kabupaten untuk Sektor Pertanian Tahun 1996 – 2001	48
Tabel 5.2. Hasil perhitungan LQ tiap kabupaten untuk Sektor Pertambangan Dan Penggalian Tahun 1996 – 2001	50
Tabel 5.3. Hasil perhitungan LQ tiap kabupaten untuk Sektor Industri Tahun 1996 – 2001	51
Tabel 5.4. Hasil perhitungan LQ tiap kabupaten untuk Sektor Listrik, Gas Dan Air Bersih Tahun 1996 – 2001	53
Tabel 5.5. Hasil perhitungan LQ tiap kabupaten untuk Sektor Bangunan Tahun 1996 – 2001	54

Tabel 5.6. Hasil perhitungan LQ tiap kabupaten untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Tahun 1996 – 2001	56
Tabel 5.7. Hasil perhitungan LQ tiap kabupaten untuk Sektor Pengangkutan Dan Komunikasi Tahun 1996 – 2001...	57
Tabel 5.8. Hasil perhitungan LQ tiap kabupaten untuk Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan Tahun 1996 – 2001	59
Tabel 5.9. Hasil perhitungan LQ tiap kabupaten untuk Sektor Jasa Tahun 1996 – 2001	60
Tabel 5.10 Hasil kompilasi analisis LQ di Jawa Tengah.....	62
Tabel 5.11 Hasil analisis Shift- Share tentang keunggulan kompetitif dan spesialisasi untuk sektor pertanian...	64
Tabel 5.12 Hasil analisis Shift - Share tentang keunggulan kompetitif dan spesialisasi untuk sektor pertambangan dan penggalian.....	65
Tabel 5.13 Hasil analisis Shift – Share tentang keunggulan kompetitif dan spesialisasi untuk sektor Industri.....	67
Tabel 5.14 Hasil analisis Shift- Share tentang keunggulan kompetitif dan spesialisasi untuk sektor Listrik , Gas dan Air Bersih.....	68
Tabel 5.15 Hasil analisis Shift- Share tentang keunggulan kompetitif dan spesialisasi untuk sektor Bangunan....	70
Tabel 5.16. Hasil analisis Shift- Share tentang keunggulan kompetitif dan spesialisasi untuk sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.....	71
Tabel 5.17 Hasil analisis Shift- Share tentang keunggulan kompetitif dan spesialisasi untuk sektor Pengangkutan dan komunikasi.....	73
Tabel 5.18. Hasil analisis Shift- Share tentang keunggulan kompetitif dan spesialisasi untuk sektor Keuangan, Sewa dan jasa perusahaan.....	74
Tabel 5.19 Hasil analisis Shift- Share tentang keunggulan kompetitif dan spesialisasi untuk sektor Jasa- Jasa....	76
Tabel 5.20 Kompilasi hasil analisis Shift – Share tentang keunggulan kompetitif persektor di Jawa Tengah.....	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Model Kerangka pemikiran teoritis.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman.
Lampiran 1. Perhitungan LQ Per Kabupaten Tahun 1996 – 2001... ..	106
Lampiran 2. Hasil perhitungan analisis shift – share per kabupaten ...	116
Lampiran 3. Hasil analisis shift – share tentang komponen perubahan pertumbuhan ekonomi perkabupaten di Jawa Tengah tahun 1996 – 2001.....	145
Lampiran 4. Hasil analisis shift – share tentang komponen perubahan Bauran Industri perkabupaten di Jawa Tengah tahun 1996 – 2001.....	146
Lampiran 5. Hasil analisis shift – share tentang komponen perubahan Keunggulan kompetitif perkabupaten di Jawa Tengah tahun 1996 – 2001.....	147
Lampiran 6. Hasil analisis shift – share tentang komponen perubahan Efek alokasi perkabupaten di Jawa Tengah tahun 1996 – 2001.....	148
Lampiran 7. Tipologi daerah Kabupaten – Kabupaten di Jawa Tengah	149
Lampiran 8. Laju pertumbuha PDRB perkabupaten menurut lapangan Usaha atas dasar harga konstan 1993 Tahun 2001.....	150
Lampiran 8. Alokasi sektor Pertanian sebagai sektor basis.....	151
Lampiran 9 Alokasi sektor pertambangan dan penggalian sebagai Sektor Basis.....	152
Lampiran 10. Alokasi sektor Industri sebagai sektor basis.....	153

Lampiran 11 Alokasi sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebagai Sektor Basis.....	154
Lampiran 12. Alokasi sektor Bangunan sebagai sektor basis.....	155
Lampiran 13 Alokasi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebagai Sektor Basis.....	156
Lampiran 14 Alokasi sektor Pengangkutan dan komunikasi sebagai Sektor Basis.....	157
Lampiran 15 Alokasi sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan Sebagai sektor Basis.....	158
Lampiran 16. Alokasi sektor Jasa – Jasa sebagai sektor basis.....	159

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Pembangunan ekonomi pada umumnya adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk dalam suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan(Lincolin arsyad, 1999, 5). Jadi pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses dimana saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan seksama .

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya- sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraaan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Dengan tujuan utama untuk menciptakan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah, maka keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tergantung dari kebijakan- kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan , dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, sumberdaya fisik secara lokal untuk insiatip pembangunan diwilayah yang bersangkutan.

Pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi yang ditandai dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta diberlakukannya undang- undang nomor 25 tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggung jawab pelaksana otonomi daerah yang antara lain dibidang ekonomi yang meliputi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam menentukan sektor- sektor yang diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut seperti yang dikatakan oleh John Glasson (1974, 62) bahwa kegiatan basis mempunyai peranan penggerak pertama (*prime mover role*) dalam pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional. Diasumsikan pula bahwa industri primer merupakan penggerak primer bagi perubahan regional dan bahwa pada setiap daerah terdapat suatu rasio employment basis/ bukan basis tertentu yang tetap konstan walaupun struktur perekonomian daerah yang bersangkutan sudah berubah . Untuk melihat adanya sektor basis/ bukan basis menurut John Glasson (1974, 63) dan Lincoln Arsyad (1999, 140) dapat ditentukan dengan menggunakan *location quotient* sedang untuk melihat perubahan struktur ekonomi di suatu daerah Menurut Hayne dan Dinc (1997, 202) menyebutkan bahwa salah satu teknik untuk pengukuran pengujian pertumbuhan dan penurunan regional

adalah suatu model yang dikenal dengan metode *Shift- Share* yang merupakan prosedur dekomposisi sektoral yang secara luas telah digunakan oleh para pakar ekonomi . ilmuwan regional , pakar geografi dan para analisis pembangunan regional. Seperti juga yang dikemukakan oleh Adi (lihat Adam, 1994:18) Analisis *shift- share* digunakan untuk merumuskan kebijakan ekonomi di suatu daerah . Alat analisis ini membantu mengetahui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto dan sektor – sektor ekonomi di suatu daerah dan kaitannya dengan daerah- daerah lain (*shift*) serta dengan nasional (*share*)

Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan – kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan sumberdaya- sumberdaya yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi . Menurut Arsyad (1997;276) mengemukakan , berdasarkan teori basis ekonomi , faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan Industri- Industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (*job creation*). Dalam pelaksanaan pembangunan perlu perencanaan yang tepat karena masing- masing daerah mempunyai keadaan yang sangat berbeda- beda . baik itu

karakteristik tiap daerah ,laju pertumbuhan ekonomi maupun sektor- sektor potensi di masing- masing daerah .

Wilayah Jawa Tengah sebagai salah satu propinsi di Pulau jawa mempunyai PDRB yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan daerah di Pulau Jawa yang lain yang mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk hampir sama seperti Jawa Timur dan jawa Barat seperti terlihat dalam Tabel 1.1 dibawah ini

Tabel 1.1.

Perbandingan jumlah penduduk, luas daerah , PDRB percapita dan PDRB Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat tahun 1996 dan 2001 Atas dasar harga konstan 1993.

No	Daerah	Jumlah penduduk th 2001	Luas Daerah	PDRB Th.1996	PDRB 2001	PDRB/ cap 2001
1	Jawa Timur	34.000.671	46.428.87	61.752.469	58.698.719	1.726.499
2	Jawa Tengah	30.775.846	32.544.12	41.862.204	41.725.567	1.355.789
3	Jawa Barat	42.428.584	43.240.09	68.243.530	57.824.843	1.362.875

Sumber data : BPS Jawa Tengah.

Dari Tabel 1.1. terlihat perbedaan jumlah penduduk Jawa Tengah bila dibandingkan dengan Jawa Timur dan Jawa Barat, demikian juga dengan luas daerahnya. Tapi PDRB Jawa Tengah juga jauh lebih kecil bila dibandingkan kedua propinsi tersebut sehingga PDRB perkapita di Jawa tengah terendah bila dibandingkan dengan kedua propinsi di Pulau Jawa tersebut. Ketiga propinsi mengalami kemunduran dalam perolehan PDRB selama masa krisis yaitu sekitar tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 namun Propinsi Jawa

Tengah tetap paling rendah diantara ketiganya. Hal ini kemungkinan disebabkan karena belum optimalnya dalam penggunaan potensi yang ada di wilayah Jawa Tengah untuk pelaksanaan pembangunan.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah pada era desentralisasi ini , dimana masing- masing daerah harus mampu berusaha sendiri untuk meningkatkan pendapatannya maka penggalan potensi daerah serta penggunaan potensi yang tepat adalah jalan terbaik , karena tanpa memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh masing- masing daerah yang bersangkutan maka pengembangan pembangunan tidak akan mencapai hasil yang optimal. Hal ini mungkin akan mengakibatkan pendapatan daerah yang kurang sesuai dengan yang diharapkan, karena masing- masing daerah mempunyai sektor – sektor yang dapat diunggulkan dan spesialisasi sendiri-sendiri .

Di Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kotamadia ,pada tiap-tiap Kabupaten masing - masing mempunyai potensi ekonomi yang khas sesuai dengan keadaan daerahnya sehingga akan mempunyai PDRB , tingkat pertumbuhan dan prioritas sektoral yang berbeda-beda pula ,seperti yang terlihat pada Tabel 1.2 dibawah ini

Tabel 1.2.
PDRB atas dasar harga konstan 1993 dan laju pertumbuhan ekonomi
menurut Kab/Kota tahun 1996 – 2001

No	Kabupaten/Kota	PDRB tahun 1996	PDRB tahun 2001	Laju Pertum buhan Ekono mi rata-rata
1	Kab. Cilacap	5.446.445,26	6.846.182,16	2.24
2	Kab. Banyumas.	1.018.612,90	1.040.236,79	0.50
3	Kab. Purbalingga.	627.920,98	629.866,08	0.15
4	Kab. Banjarnegara	868.955,28	825.466,99	-0.36
5	Kab. Kebumen.	968.229,04	915.370,26	-0.76
6	Kab. Purworejo.	680.228,04	707.550,88	0.84
7	Kab. Wonosobo.	573.553,73	527.635,31	-1.49
8	Kab. Magelang.	1.023.386,41	1.096.201,91	1.42
9	Kab. Boyolali.	946.661,14	935.467,99	-0.12
10	Kab. Klaten.	1.261.298,46	1.247.746,75	-0.04
11	Kab. Sukoharjo.	1.163.570,12	1.157.846,99	-0.07
12	Kab. Wonogiri.	758.270,58	804.087,16	1.23
13	Kab. Karanganyar.	1.210.112,30	1.210.084,99	-0.21
14	Kab. Sragen.	714.535,95	712.656,17	-0.06
15	Kab. Grobogan.	790.128,48	741.821,42	-1.10
16	Kab. Blora.	703.277,83	693.863,03	-0.76
17	Kab. Rembang.	499.151,33	524.181,35	1.16
18	Kab. Pati.	925.993,50	969.013,34	0.95
19	Kab. Kudus.	3.421.058,34	3.185.768,25	-1.26
20	Kab. Jepara.	900.287,56	1.037.969,05	2.76
21	Kab. Demak.	752.670,90	769.047,86	1.20
22	Kab. Semarang.	1.154.995,76	1.082.378,77	-0.89
23	Kab. Temanggung.	683.965,11	728.586,02	1.03
24	Kab. Kendal.	1.572.394,36	1.594.832,69	0.02
25	Kab. Batang.	747.105,14	737.198,22	-0.13
26	Kab. Pekalongan.	856.440,93	899.546,40	1.11
27	Kab. Pemalang.	1.003.253,35	1.124.314,36	2.33
28	Kab. Tegal.	883.565,73	952.070,98	1.66
29	Kab. Brebes.	1.173.207,56	1.447.843,91	3.39
30	Kota Magelang.	308.668,76	328.162,25	1.33
31	Kota Surakarta.	1.374.559,01	1.353.882,64	-0.56
32	Kota Salatiga	238.183,35	263.644,76	1.00
33	Kota Semarang.	5.276.979,86	5.405.239,41	2.25
34	Kota Pekalongan	423.554,37	453.338,37	1.49
35	Kota Tegal.	338.524,86	377.701,80	2.28
	Jateng	41.862.203,72	43.383.106,89	0.43

Sumber : BPS Jawa Tengah

Dari Tabel 1.2. terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi masing- masing kabupaten/ kota mulai tahun 1996 – 2001 ada 13 Kabupaten/ kota yang mempunyai laju pertumbuhan yang negatif. Namun ada 3 kabupaten yang laju pertumbuhan ekonominya negatif lebih dari 1 yaitu kabupaten Wonosobo, Kabupaten, Kudus dan kabupaten Grobogan. Walaupun Kab. Kudus mempunyai PDRB yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain, tapi karena laju pertumbuhannya negatif maka daerah tersebut perlu mendapat perhatian yang lebih, apakah pengembangan pembangunan di kabupaten tersebut sudah sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Untuk Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Grobogan disamping laju pertumbuhannya negatif PDRB nya juga relatif rendah, maka pemilihan sektor prioritas dalam pengembangan pembangunan untuk kedua daerah tersebut harus lebih diperhatikan. Demikian juga untuk Kabupaten/kota yang lainnya walaupun laju pertumbuhannya positif, untuk meningkatkan PDRB agar hasilnya optimum juga perlu pemilihan sektor – sektor yang diprioritaskan sehingga dapat menggunakan potensi daerah secara lebih optimal terutama untuk wilayah kabupaten dimana kabupaten masih mempunyai potensi untuk dikembangkan. Sedangkan untuk Wilayah Kota karena kondisi yang berbeda dengan kabupaten, baik itu kondisi alamnya maupun sumberdaya yang lain maka kebijakan untuk wilayah ini harus dilaksanakan secara terpisah.

Sektor – sektor yang dapat diunggulkan untuk tiap- tiap daerah adalah sektor- sektor yang merupakan sektor basis, mempunyai keunggulan

kompetitif dan merupakan sektor yang mempunyai spesialisasi untuk daerah tersebut. Analisa mengenai sektor- sektor ini sangat diperlukan untuk perencanaan pengembangan pembangunan dimasa yang akan datang terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Melihat dari kenyataan diatas perlu diadakan penelitian mengenai potensi daerah masing- masing Kabupaten yang ada di Jawa Tengah dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama untuk pelaksanaan otonomi daerah yang sudah mulai dilaksanakan. Untuk itu penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul:

“ Analisis Sektor Basis dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah Studi kasus Kabupaten – kabupaten Di Jawa tengah tahun 1996 – 2001 “

1.2. Perumusan Masalah.

Dibanding dengan Jawa Barat dan Jawa Timur , Jawa Tengah termasuk daerah yang perekonomiannya lebih rendah . Rendahnya perekonomian di Jawa Tengah ini disebabkan belum optimalnya pengembangan potensi daerah. Hal – Hal yang perlu dianalisis adalah:

- a. Sektor mana ditiap kabupaten yang mempunyai potensi sebagai sektor basis.
- b. Sektor – sektor mana yang mempunyai daya saing (keunggulan kompetitif) dan spesialisasi.

- c. Daerah – daerah mana yang dapat digunakan untuk memacu pengembangan pembangunan.
- d. Bagaimana penentuan prioritas sektor Basis untuk pengembangan pembangunan di Jawa Tengah dan tiap Kabupaten.

1.3. Tujuan dan manfaat penelitian:

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis potensi ekonomi di masing- masing Kabupaten/ kota di wilayah Jawa Tengah dengan cara :

- a. Mengetahui sektor- sektor Basis di tiap kabupaten di Jawa Tengah.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis kinerja sektor- sektor ekonomi di masing- masing daerah terutama untuk mengetahui sektor sektor yang mempunyai daya persaingan kompetitif dan spesialisasi.
- c. Menganalisis tipologi masing- masing daerah berdasarkan potensi yang ada.
- d. Menentukan prioritas sektor basis untuk pengembangan pembangunan di Jawa Tengah dan kabupaten.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Ilmu pengetahuan :

Menambah bahan studi kepustakaan tentang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah untuk dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan studi – studi selanjutnya. Dengan menggabungkan metodologi LQ dan shift- share dan tipologi daerah untuk menentukan prioritas sektor basis.

b. Bagi pemerintah Daerah :

- Dengan mengetahui potensi ekonomi dan tipologi tiap kabupaten/kota akan memudahkan pemerintah Jawa Tengah untuk memilih alternatif dalam kebijakan pembangunan ekonomi Daerah.
- Memberikan informasi yang dipertimbangkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tentang kinerja masing- masing sektor sebagai bahan pertimbangan yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA

PEMIKIRAN TEORITIS

2.1. Teori basis Ekonomi

Kegiatan dalam perekonomian regional dapat dibagi menjadi kegiatan – kegiatan basis dan kegiatan- kegiatan bukan basis. Menurut *Glasson* (1974, 63) Kegiatan- kegiatan Basis (*Basic Activities*) adalah kegiatan- kegiatan mengekspor barang- barang dan jasa – jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang- barang dan jasa- jasa mereka kepada orang- orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan- kegiatan bukan basis (*Non basic activities*) adalah kegiatan – kegiatan menyediakan barang- barang yang dibutuhkan oleh orang – orang yang bertempat tinggal didalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan- kegiatan ini tidak mengekspor barang- barang jadi; luas lingkup produksi dan daerah pasar yang terutama bersifat lokal. Implisit didalam pembagian kegiatan- kegiatan ini terdapat hubungan sebab akibat yang membentuk teori basis ekonomi. Bertambah banyaknya basis didalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan kedalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa maka akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa akan menurunkan volume kegiatan . Kegiatan basis

mempunyai peranan penggerak pertama (*Prime mover role*) dimana setiap perubahan mempunyai efek multiflier terhadap perekonomian regional.

Pendekatan secara tidak langsung mengenai pemisahan antara kegiatan basis dan kegiatan bukan basis dapat menggunakan salah satu ataupun gabungan dari 3 metode yaitu :

- a. Menggunakan asumsi – asumsi atau metode arbetrer sederhana yang mengasumsikan bahwa semua industri primer dan manufacturing adalah Basis, dan semua industri Jasa adalah bukan basis , metode tidak memperhitungkan adanya kenyataan bahwa dalam sesuatu kelompok industri bisa terdapat industri – industri yang menghasilkan barang-barang yang sebagian diekspor atau dijual kepada lokal atau ke duanya.
- b. Metode *Location Quotion* (LQ, kuosion lokasi) .

Metode Location Qoution (LQ) ini adalah salah satu metode untuk menentukan sektor basic atau non basic. Dengan dasar pemikiran *economic base* Kemampuan suatu sektor dalam suatu daerah dapat dihitung dari rasio berikut :

$$LQ = (L_{ij}/L_j) / (N_{ip}/N_p) \quad (1)$$

Keterangan :

L_{ij}	= Nilai tambah sector I di daerah j (Kabupaten/Kota)
L_j	= Total nilai tambah sector di daerah j (Kabupaten/Kota)
J	= Kabupaten/Kota
N_{ip}	= Nilai tambah sector di daerah p (Propinsi/ Nasional)
N_p	= Total nilai tambah sector di p (Prop/Nasional
p	= Propinsi /Nasional
L_{ij}/L_j	= Prosentasi employment regional dalam sector I
N_{ip}/N_p	= Prosentase employment nasional dalam sector I

Rasio yang lebih besar dari pada 1 ($LQ > 1$) menunjukkan kegiatan ekspor atau basis, dan jumlah pekerja yang merupakan selisih dari jumlah yang diperoleh untuk mencapai $LQ = 1$ (yakni yang melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencapai swa- sembada regional) dianggap sebagai tenaga kerja yang melayani pasar ekspor. Rasio $LQ < 1$ menunjukkan kegiatan lokal atau bukan basis. Metode ini memperhitungkan penjualan barang- barang antara dan mudah diterapkan, tetapi seperti keseragaman produktivitas pola - pola permintaan regional dan nasional dan keseragaman produktivitas regional menurut sektor industri melemahkan reabilitasnya.

Penggunaan LQ ini sangat sederhana dan banyak digunakan dalam analisis sektor- sektor basic dalam suatu daerah namun teknik ini mempunyai suatu kelemahan yaitu :

- Selera atau pola konsumsi dari anggota masyarakat itu berbeda – beda baik antar daerah maupun antar suatu daerah.
- Tingkat konsumsi rata- rata untuk suatu jenis barang untuk setiap daerah berbeda .
- Bahan keperluan industri berbeda antar daerah .

Walaupun teori ini mengandung kelemahan- kelemahan , namun sudah banyak studi empirik yang dilakukan dalam rangka usaha memisahkan sektor- sektor basic – bukan basic. Menurut Plout (1960) dan Tiebout (1962) seperti yang tercantum dalam Harry W. Richardson (1977, 14)

bahwa usaha- usaha memisahkan sektor – basic/ bukan basic ini hasilnya dapat kita bermanfaat asalkan kita menyadari akan keterbatasannya, dan hasilnya dapat kita pergunakan untuk memperjelas pengertian mengenai struktur ekonomi yang bersangkutan.

Disamping mempunyai kelemahan – kelemahan yang ada , metode ini juga mempunyai dua kebaikan penting , pertama Ia memperhitungkan ekspor tidak langsung dan ekspor langsung , kedua metode ini tidak mahal dan dapat diterapkan pada data historik untuk mengetahui trend.

- c. Metode ketiga, yakni kebutuhan minimum(*minimum requirements*) adalah modifikasi dari metode LQ dengan menggunakan distribusi minimum dari employment yang diperlukan untuk menopang industri regional dan bukannya distribusi rata – rata .Untuk setiap daerah yang pertama dihitung adalah persentase angkatan kerja regional yang dipekerjakan dalam setiap industri. Kemudian persentase – persentase itu diperbandingkan dengan perhitungan hal – hal yang bersifat kelainan dan persentase terkecil dipergunakan sebagi ukuran kebutuhan minimum bagi industri tertentu. Persentase minimum ini dipergunakan sebagai batas dan semua employment di daerah- daerah lain yang lebih tinggi dari persentase dipandang sebagai employment basis. Proses ini dapat diulangi untuk setiap industri di daerah bersangkutan untuk memperoleh employmen basis total. Dibandingkan dengan metode LQ, metode ini malahan lebih bersifat arbitere karena sangat tergantung pada pemilihan persentase

minimum dan tingkat disagregasi – disagregasi yang terlalu terperinci malahan dapat mengakibatkan hampir semua sektor menjadi kegiatan kegiatan basis atau ekspor.

Teori basis ini mempunyai kebaikan mudah diterapkan, sederhana dan dapat menjelaskan struktur perekonomian sesuatu daerah dan impak umum dari perubahan – perubahan jangka pendek. Keterbatasan teori ini tidak terlalu ketat dan dapat menjadi landasan yang sangat bermanfaat bagi peramalan jangka pendek .

2.2. Analisis shift- share :

Untuk mengetahui perubahan struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di Daerah dibandingkan dengan perekonomian daerah yang lebih tinggi digunakan analisis *Shift- Share* Menurut Bendavid- Val (1983), Hoover(1984) (Lihat Soepono ,1993.44) tehnik ini menggambarkan *performance* (kinerja) sektor – sektor disuatu wilayah dibandingkan kinerja sektor - sektor perekonomian nasional. Dengan demikian dapat ditunjuk temukan adanya *shift* (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah, bila daerah itu memperoleh kemajuan lebih lambat atau lebih cepat dari kemajuan nasional. Arsyad (1997, 290) mengemukakan bahwa analisis *shift- share* merupakan tehnik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional . Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja perekonomian

daerah dengan membandingkan perekonomian tingkat nasional. Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian daerah dalam tiga bidang yang berhubungan satu sama lain yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menganalisis perubahan pengerjaan sgregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian tingkat nasional
- b. Pergeseran proporsional (*Proporsional shift*) Mengukur perubahan relatif , pertumbuhan atau penurunan perekonomian daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk menegetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada sektor – sektor yang tumbuh lebih cepat ketimbang sektor perekonomian nasional.
- c. Pergeseran diferensial (*differensial shift*) menentukan seberapa jauh daya saing sektort daerah (lokal) dengan perekonomian nasional.

Menurut Richadson tahun 1987 (Lihat Adam, 1994:18) Bentuk umum model *Shift- share analysis* membutuhkan dua sumber informasi, yaitu PDRB di tingkat regional dan PDB tingkat nasional. *Shif- shrae analysis* sebagai suatu model identitas, memiliki tiga komponen sebagai berikut :

- a. *Share regional* , adalah suatu jumlah dimana tingkat produksi suatu daerah agar bisa tumbuh sama tinggi dengan tingkat pertumbuhan nasional.

- b. *Shift Proporsional (P-Shift)* adalah suatu jumlah dimana pertumbuhan produksi disuatu daerah , lebih cepat atau lebih lambat dari tingkat pertumbuhan nasional karena tingginya konsentrasi sektor regional.
- c. *Shift Differential (D- Shift)* adalah suatu jumlah dimana tingkat pertumbuhan suatu sektor disuatu daerah lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di daerah lain.

Dalam penggunaan *analysis shift- share* ini harus mempertimbangkan keterbatasan teoritik yang ada. Menurut Soepono (1993: 45 – 46) mencatat empat keterbatasan teoritik dari *analysis shift – share* ini yaitu :

- a. Persamaan *shift share* adalah suatu persamaan identitas sehingga tidak mempunyai implikasi- impkasi keperilakuan. Karena itu metode bukan untuk menjelaskan dan tidak analitik tetapi hanya mencerminkan suatu sitem akounting.
- b. Pertumbuhan industri pada suatu wilayah dibebani laju pertumbuhan yang ekuivalen dengan laju pertumbuhan tingkat nasional. Gagasan ini sangat sederhana sehingga dapat mengaburkan sebab- sebab pertumbuhan suatu wilayah.
- c. Arti ekonomi dari dua komponen *shift* tidak dikembangkan dengan baik, sehingga tidak mudah dibedakan/ dipisahkan.
- d. *Analysis shift- share* mengasumsikan bahwa semua barang yang dijual secara nasioanl. Asumsi ini kurang realistis karena suatu barang yang bersifat lokal tidak bersaing dengan barang sejenis yang dihasilkan

wilayah lain sehingga barang yang bersangkutan tidak memperoleh bagian dari permintaan agregat.

Estaban marquillas tahun 1972 (Soepomo, 1993:47) berusaha memodifikasi analisis shift- share ini sehingga terlihat pengaruh persaingan yang meliputi pengaruh persaingan dan pengaruh alokasi yang pada nantinya dapat menunjukkan keunggulan kompetitif dan sektor spesialisasi.

2.3. Tipologi ekonomi regional.

Karakteristik tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan kelasn tipologi (sjahrizal, 1997: 29 – 30) digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama , yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan percapita daerah dengan menentukan rata- rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertical dan rata- rata pendapatan percapita sebagai sumbu horizontal. Daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh(*High growth and high income*), daerah maju tapi tertekan(*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*).

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh(*High growth and high income*)
adalah laju pertumbuhan PDRB dan pendapatan percapita lebih tinggi dari rata – rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita rata- rata nasional.
- b. Daerah maju tapi tertekan. (*high income but low growth*) yaitu daerah yang relatif maju, tapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhan menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Daerah ini merupakan daerah yang telah maju tapi dimasa mendatang pertumbuhannya tidak akan begitu cepat walaupun potensi pengembangan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.Daerah ini mempunyai pendapatan perkapita lebih tinggi tapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan rata- rata nasional.
- c. Daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) adalah daerah yang dapat berkembang cepat dengan potensi pengembangan yang dimiliki sangat besar tapi belum diolah sepenuhnya secara baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah sangat tinggi, namun tingkat pendapatan perkapita yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah. Daerah ini memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibandingat dengan rata- rata nasional.
- d. Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*). adalah daerah yang masih mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita lebih rendah dari pada rata- rata nasional..

2.4 . Penelitian t erdahulu.

Penelitian mengenai sektor basis telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti. Analisis yang digunakan sebagian besar adalah analisis *shift – share* dan LQ. Ada pula peneliti disamping menggunakan analisis *shift – share* dan LQ juga menggunakan analisis lain seperti klassen tipologi (Yuliana Yuvita Ning sarwati , 2000) atau analisis LQ digabungkan dengan klassen tipologi dan Logistik Regression seperti yang dilakukan oleh Hairul Aswandi dan Mudrajad Kuncoro (2002). Secara lengkap penelitian terdahulu seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Alat Penelitian	Judul dan Hasil penelitian
1	2	3	4
1	Fuad Assadin dan Faried Wijaya mansoer (2001,89,163)	- LQ - Shift – Share	Judul : Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja : terapan model kebijakan prioritas sektoral untuk Kalimantan Timur. Hasil penelitian : pertumbuhan ekonomi mempe- ngaruhi perkembangan kesempatan kerja, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi cenderung semakin membuka kesempatan kerja, laju pertumbuhan kesempatan kerja di Kaltim lebih tinggi dari pada Propinsi lain, laju kesempatan kerja di daerah lebih cepat , sedang komponen daya kompetitif menunjukkan nilai negatif.

1	2	3	4
2	Yulianan Yuvita Ning Sarwati (2000)	- Klassen Tipologi - Shift – Share - LQ	Judul : Pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi regional Jawa Tengah periode 1985 – 1996 Hasil penelitian : Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama kurun waktu 12 tahun rata- rata lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengalami berbagai fluktuasi, tipologi daerah termasuk katagori “ daerah pertumbuhan cepat “ sedang pendapatan perkapita lebih rendah dari pada pendapatan perkapita nasional, sektor andalan pada periode 1985 – 1996 adalah ; Sektor pertanian, Industri pengolahan, perdagangan hotel dan restoran serta sektor jasa- jasa dan listrik, gas dan air bersih, secara umum struktur ekonomi Jawa Tengah ada beberapa sektor yang mempunyai peranan cukup besar terhadap peningkatan PDBR tapi koefisien LQ nya selalu lebih kecil dari 1 dan sektor pertanian cukup dominan dalam pembentukan PDRB Jawa Tengah.
3	Rahwati Sri Lestari (2000)	- LQ - Shift - Share	Judul : Analisis pengembangan wilayah dan sektor potensi di kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Hasil Penelitian : Kab. Tangerang memiliki fungsi untuk kegiatan pemukiman, transportasi, pertanian, industri, pendidikan dan pariwisata dikembangkan atas dasar analisis potensi wilayah karena tiap

1	2	3	4
			<p>kecamatan mempunyai potensi yang berbeda- beda.</p> <p>Strategi yang dipakai oleh pemerintah Kabupaten Tangerang adalah dengan menggunakan pusat-pusat pertumbuhan dan simpul-simpul pelayanan..</p> <p>Pertumbuhan di Kabupaten tangerang secara fisik berkembang pesat pola pengembangan yang ada terbentuk karena factor- factor potensi wilayah aksesibilitas dan keterbatasan fisik setiap kecamatan membentuk kecenderungan pola pengembangan, sesuai dengan potensi yang ada</p>
4	Hairul Aswandi dan Mudrajad Kuncoro (2002, 27 – 45)	<ul style="list-style-type: none"> - LQ - Klassen tipologi - Log regresi 	<p>Judul : Evaluasi penetapan kawasan andalan : studi empiris di Kalimantan Selatan 1993 – 1999</p> <p>Hasil penelitian :</p> <p>pertimbangan penetapan kawasan andalan di Kalimantan Selatan hanya mengacu pada pendapatan percapita dan sub sektor unggulan yang ditunjuukan oleh hasil analisa LQ dan model logit. Pertumbuhan PDRB dan spesialisasi daerah ternyata tidak menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan kawasan andalan di Kalimantan Selatan.</p>

2.5.Kerangka pemikiran teoritis :

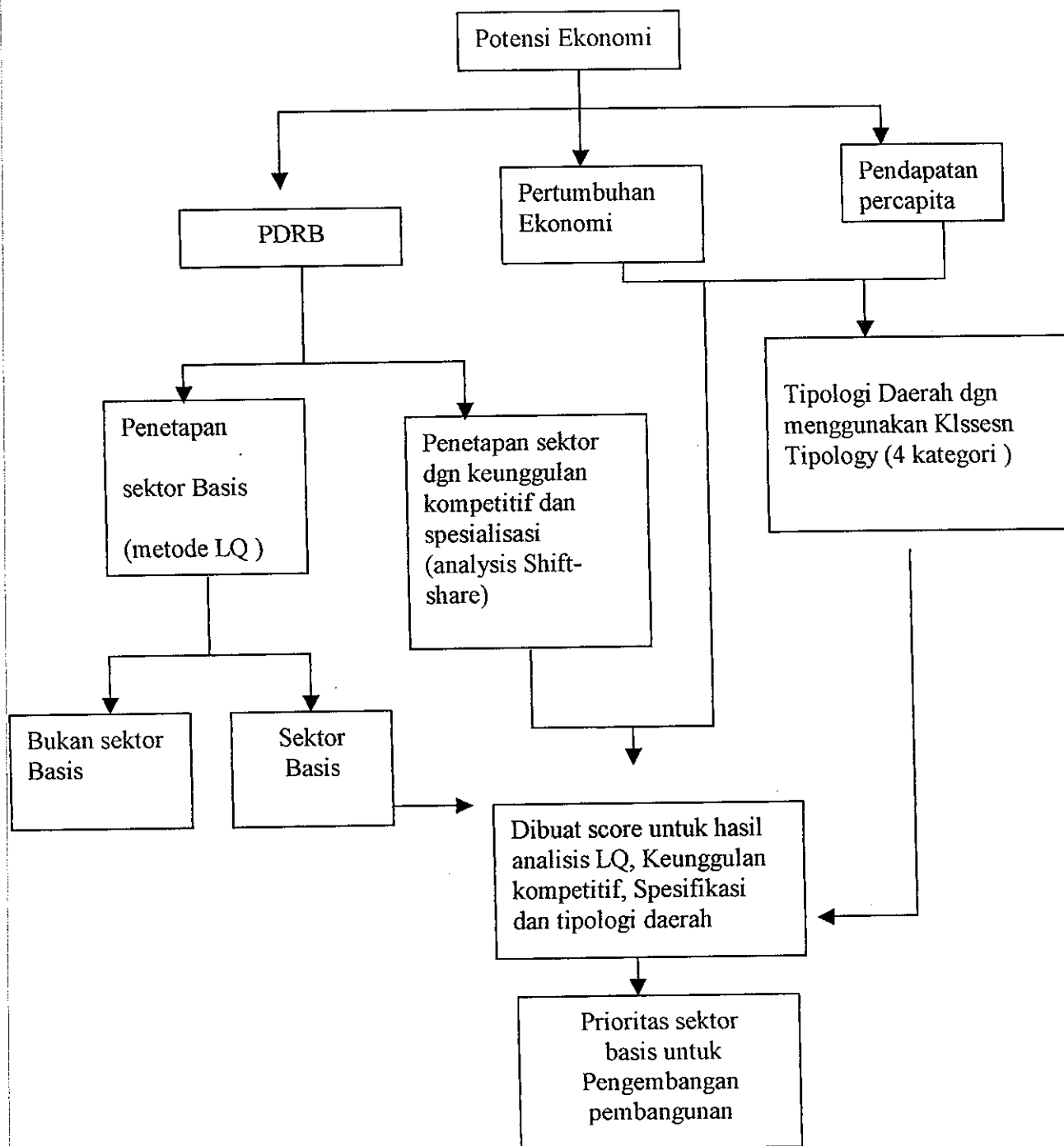
Pada dasarnya potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dapat ditunjukkan dengan besarnya PDRB yang dihasilkan, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan percapita. Dari PDRB akan dapat diketahui output yang

dihasilkan tiap sektor dan digunakan untuk menentukan sektor basis serta sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi. Dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan percapita dapat diketahui tipologi daerah.

Pengaruh antara variabel keunggulan kompetitif, spesialisasi dan pertumbuhan ekonomi persektor terhadap sektor basis yang signifikan, digunakan untuk menentukan sektor basis dalam perencanaan pengembangan pembangunan daerah dan disesuaikan dengan tipologi daerah yang bersangkutan.

Keberhasilan suatu program pengembangan pembangunan sangat tergantung pada perencanaan pembangunan di daerah itu sendiri yang harus disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Perencanaan pembangunan itu harus mempertimbangkan sumber daya yang dapat dikembangkan di daerah tersebut, tidak hanya sektor tersebut sebagai sektor basis tapi juga harus mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi sehingga nantinya dapat bersaing dengan daerah sekitarnya. Disamping kedua variabel tersebut harus dipertimbangkan pula tipologi dari daerah itu sendiri.

Dari model serta teori yang mendasari maka dapat disusun suatu model sebagai berikut :



Gambar 2.1.: Model kerangka pemikiran teoritis

2.6. Definisi Operasional :

a. Potensi Ekonomi :

Jumlah kontribusi yang diberikan masing- masing sektor terhadap pendapatan Daerah masing- masing Kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Kontribusi ekonomi biasanya dihitung dengan jumlah PDRB yang dihasilkan .

b. PDRB :

Merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah. Dapat dilihat atas dasar harga berlaku atau harga konstan . PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu biasanya satu tahun. Dalam penelitian ini PDRB menggunakan PDRB atas dasar jarga konstan tahun 1993.

c. Pertumbuhan Ekonomi :

Adalah pertumbuhan PDRB rata- rata mulai tahun 1996 – 2001 yang dihitung dengan rumus :

$(E_{*ij} - E_{ij}) / E_{ij}$ untuk pertumbuhan menurut lapangan usaha dan

$(E_{*j} - E_j) / E_j$ untuk pertumbuhan PDRB

Dimana :

E = Out put

I = lapangan usaha (sektor)

J = Kabupaten

*= tahun terachir

d. Pendapatan perkapita :

Adalah perkiraan pendapatan perorangan yang dihasilkan dari PDRB per tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

e. Analisis LQ

adalah analisis yang digunakan untuk menentukan sektor basis dan sektor non basis di masing- masing Kabupaten/Kota dari sektor sektor pembangunan yang ada yaitu :

- Sektor pertanian.
- Sektor pertambangan dan penggalian
- Industri pengolahan.
- Listrik , gas dan air bersih.
- Bangunan
- Perdagangan, Hotel dan restoran.
- Pengangkutan dan komunikasi.
- Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
- Jasa - jasa.

f. Sektor Basis :

Adalah Sektor yang mampu mengeksport barang- barang dan jasa – jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya bila dibandingkan dengan sektor yang sama pada lingkup yang lebih luas. Sektor basis ini bila nilai $LQ > 1$.

g. Sektor Non Basis

Adalah sektor yang hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan daerah itu sendiri dan Sektor ini tidak dapat mengekspor barang diluar daerah. Bila nilai $LQ < 1$ maka disebut sektor non basis.

h. Analisis *Shift- Share* .

Adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis kondisi ekonomi persektor di masing- masing Kab/ Kota sewilayah Jawa Tengah .

Dengan analisis ini nanti diharapkan akan menghasilkan apakah sektor tersebut mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi atau tidak.

i. Keunggulan kompetitif .

Suatu sektor mempunyai keunggulan kompetitif bila laju pertumbuhan sektor ditingkat kabupaten lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan pada sektor yang sama di tingkat Jawa Tengah ($r_{ij} - r_{in}) > 0$

Dimana :

r_{ij} = Laju pertumbuhan wilayah kabupaten persektor didapat dari rumus

$$(E^*_{ij} - E_{ij}) / E_{ij}$$

r_{in} = Laju pertumbuhan Jawa Tengah persektor didapat dari rumus

$$(E^*_{in} - E_{in}) / E_{in}$$

j. Spesialisasi :

Suatu sektor mempunyai spesialisasi bila variabel wilayah nyata lebih besar dari pada dengan variabel yang diharapkan ($E_{ij} - E_{ij}') > 0$

Dimana :

E_{ij} = nilai PDRB persektor di tiap Kabutan tahun 1996.

E_{ij}' = adalah E_{ij} yang diharapkan didapat dari rumus : $E_{ij} (E_{in}/E_n)$

E_{in} = Nilai PDRB persektor di propinsi Jawa Tengah tahun 1996

E_n = Jumlah total PDRB Propinsi Jawa Tengah pada tahun 1996

k. Tipologi daerah.

Tipologi daerah ditentukan dengan menggunakan tipologi Klassen ,dibagi menjadi 4 kategori yaitu :

- ❖ Tipologi 1 : Daerah maju dan cepat tumbuh
- ❖ Tipologi 2 : Daerah maju tapi tertekan
- ❖ Tipologi 3 :: adalah Daerah berkembang cepat.
- ❖ Tipologi 4 : Daerah relatif tertinggal

mempunyai peranan penggerak pertama (*Prime mover role*) dimana setiap perubahan mempunyai efek multiflier terhadap perekonomian regional.

Pendekatan secara tidak langsung mengenai pemisahan antara kegiatan basis dan kegiatan bukan basis dapat menggunakan salah satu ataupun gabungan dari 3 metode yaitu :

- a. Menggunakan asumsi -- asumsi atau metode arbetrer sederhana yang mengasumsikan bahwa semua industri primer dan manufacturing adalah Basis, dan semua industri Jasa adalah bukan basis , metode tidak memperhitungkan adanya kenyataan bahwa dalam sesuatu kelompok industri bisa terdapat industri – industri yang menghasilkan barang-barang yang sebagian diekspor atau dijual kepada lokal atau ke duanya.

- b. Metode *Location Quotion* (LQ, kuosion lokasi) .

Metode Location Qoution (LQ) ini adalah salah satu metode untuk menentukan sektor basic atau non basic. Dengan dasar pemikiran *economic base* Kemampuan suatu sektor dalam suatu daerah dapat dihitung dari rasio berikut :

$$LQ = (L_{ij}/N_{ip}) / (L_j/N_p) \quad (1)$$

Keterangan :

L_{ij}	= Nilai tambah sector I di daerah j (Kabupaten/Kota)
L_j	= Total nilai tambah sector di daerah j (Kabupaten/Kota)
J	= Kabupaten/Kota
N_{ip}	= Nilai tambah sector di daerah p (Propinsi/ Nasional)
N_p	= Total nilai tambah sector di p (Prop/Nasional
p	= Propinsi /Nasional
L_{ij}/L_j	= Prosentasi employment regional dalam sektor I
N_{ip}/N_p	= Prosentase employment nasional dalam sektor I

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber data

Untuk mengetahui sektor- sektor basis dan menganalisis kinerja sektor – sektor ekonomi dalam menentukan sektor sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi serta menganalisis tipologi daerah dibutuhkan data :

- a. Data PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun '1993 per Kabupaten mulai tahun 1996 - 2001.
- b. Data laju pertumbuhan PDRB persektor atas dasar harga konstan tahun 1993 per kabupaten mulai tahun 1996 – 2001.
- c. Pendapatan perkapita perkabupaten mulai tahun 1996 – 2001
- d. Data PDRB Jawa Tengah menurut lapangan usaha atas da\sar harga konstan 1993 mulai tahun 1996 – 2001.
- e. Laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan `tahun 1993 mulai tahun 1996 – 2001
- f. Pendapatan perkapita Jawa Tengah tahun 1996 - 2001.

3.2. Metode Pengumpulan data :

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi pustaka yaitu dengan menggunakan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang berupa dokumen ataupun arsip yang didapatkan dari kantor statistik Jawa Tengah, Kantor statistik Kabupaten , Bappeda maupun berupa catatan perkuliahan.

3.3. Metode analisis :

3.3.1. Metode LQ

Untuk mengetahui sektor – sektor basis di masing- masing kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah menggunakan rumus *Location Qoution (LQ)* pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di Kabupaten/Kota dengan sektor yang sama di daerah yang lebih luas yaitu Jawa Tengah. Melalui analisis LQ dapat diketahui sektor- sektor yang memiliki kemampuan (potensi) sebagai identifikasi sektor basis dan serta sektor- sektor non basis yang memiliki kecenderungan import dari daerah lain. Adapun analisis yang digunakan adalah melalui data PDRB atas dasar harga konstan dengan rumus :

$$LQ = (L_{ij}/L_j) / (N_{ip}/N_p) \quad (2)$$

Keterangan:

L_{ij} = Nilai tambah sektor I di daerah j (Kabupaten)

L_j = Total nilai tambah sektor di daerah j (Kabupaten)

J = Kabupaten
 Nip = Nilai tambah sektor di daerah p (Prop. Jawa Tengah)
 Np = Total nilai tambah sektor di p (Prop. Jawa Tengah)
 p = Propinsi Jawa Tengah

Hasil yang diharapkan dari analisa ini adalah didapatkannya sektor-sektor basis yang terdapat di masing-masing kabupaten se Jawa Tengah yang dapat dipacu pertumbuhannya untuk dapat meningkatkan pertumbuhan PDRB kabupaten yang bersangkutan.

3.3.2. Metode analisis shift- share

Untuk Mengidentifikasi dan menganalisis kinerja sektor- sektor ekonomi masing- masing kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Tengah dan menentukan sektor- sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi Metode analisis yang digunakan adalah tehnik analisis *Shift- share*. Tehnik ini memilih pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variable wilayah dalam kurun waktu tertentu yang terdiri atas perubahan sebagai akibat dari pengaruh pertumbuhan daerah diatasnya (N) , bauran industri (M) dan keunggulan kompetitif atau persaingan (C) . Pengaruh pertumbuhan dari daerah diatasnya disebut pangsa (*share*) , Pengaruh bauran industri disebut *proposional shift* dan pengaruh persaingan (keunggulan kompetitif) disebut *differential shift* atau *regional share* . Pengaruh bauran industri (Mij) yaitu suatu wilayah mempunyai industri – industri yang menguntungkan yang tumbuh lebih cepat daripada laju pertumbuhan daerah diatasnya Untuk pengaruh

persaingan bila suatu industri tertentu diwilayah tertentu tumbuh lebih cepat disuatu wilayah dari pada industri yang sama ditingkat yang lebih tinggi , maka untuk sektor tertentu diwilayah tertentu perubahan variable dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \quad (3)$$

Keterangan :

$N_{ij} = E_{ij} (r_n)$ (Pertumbuhan nasional sektor I di wilayah j)

$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n)$ (Bauran industri sektor I di wilayah j)

$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$ (keunggulan kompetitif sektor I diwilayah j)

r_{ij} adalah laju pertumbuhan wilayah persektor, sedangkan r_n dan r_{in} adalah laju pertumbuhan nasional persektor yang masing masing didefinisikan sebagai berikut :

$$r_{ij} = (E^*_{ij} - E_{ij}) / E_{ij}$$

$$r_{in} = (E^*_{in} - E_{in}) / E_{in}$$

$$r_n = (E^*_n - E_n) / E_n$$

Keterangan

E_{ij} = Nilai tambah sektor I diwilayah j (Kabupaten /Kota)

E_{in} = Nilai tambah sektor I diwilayah nasional (Jawa Tengah).

E_n = Nilai tambah nasional

Tanda * menunjukkan tahun akhir analisis.

Maka analisis *shift – share* dapat ditunjukkan dengan rumus :

$$D_{ij} = E_{ij} (r_n + E_{ij} (r_{in} - r_n) + E_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \quad (4)$$

Untuk mengetahui keunggulan kompetitif dan spesialisasi maka analisis *shift – share* yang digunakan adalah analisis *shift- share* dengan modifikasi dari *Estaban Marquillas* (lihat soepono, 1993:47) yaitu Komponen ketiga dengan persamaan :

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_n)$$

Disempurnakan menjadi :

$$C'_{ij} = E'_{ij} (r_{ij} - r_n) \quad (5)$$

Keterangan :

C'_{ij} adalah persaingan atau ketidak unggulan kompetitif di sektor I pada perekonomian suatu wilayah menurut analisis *shift- share* tradisional.

E'_{ij} adalah E_{ij} yang diharapkan dan di peroleh dari :

$$E'_{ij} = E_j (E_{in}/E_n) \quad (6)$$

Sedang pengaruh lokasi sebagai bagian yang belum dijelaskan dari suatu variable wilayah (A_{ij}) dapat dirumuskan sebagai :

$$A_{ij} = (E_{ij} - E'_{ij}) (r_{in} - r_n) \quad (7)$$

Keterangan :

($E_{ij} - E'_{ij}$) = Tingkat spesialisasi terjadi apabila variable wilayah nyata (E_{ij}) lebih besar dari variable yang diharapkan (E'_{ij})

($r_{ij} - r_n$) = Keunggulan kompetitif terjadi bila laju pertumbuhan sektor di daerah lebih besar dari pada laju pertumbuhan sektor nasional/regional.

A_{ij} = pengaruh alokasi dibagi menjadi dua bagian yaitu adanya tingkat spesialisasi sektor I di wilayah j dikalikan dengan keunggulan kompetitif.

Maka pengaruh alokasi ini disubstitusikan dalam analisis *shift share* tradisional menjadi persamaan *shift share* yang di modifikasi oleh *Estaban Marquillas* (E – M) dengan persamaan :

$$D_{ij} = E_{ij} (r_n) + E_{ij} (r_n - r_n) + E'_{ij} (r_{ij} - r_n) + (E_{ij} - E'_{ij}) (r_{ij} - r_n) \quad (8)$$

Hasil yang diharapkan dari analisa ini adalah di tentukannya sektor-sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi di masing-masing kabupaten/Kota .

3.3.3. Penentuan Tipologi daerah

penentuan tipologi yang digunakan adalah pembagian menurut Klassen Tipologi. Dimana Daerah dibagi menjadi 4 tipologi dengan ketentuan :

- ❖ Tipologi 1 : Daerah maju dan cepat tumbuh adalah Kabupaten yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB rata- rata diatas rata- rata pertumbuhan PDRB Jawa Tengah dan pendapatan percapita diatas rata- rata diatas pendapatan percapita Jawa Tengah.
- ❖ Tipologi 2 : Daerah maju tapi tertekan adalah Kabupaten yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB rata- rata lebih rendah dari rata- rata pertumbuhan PDRB Jawa Tengah dan pendapatan percapita lebih tinggi rata- rata diatas pendapatan percapita Jawa Tengah.

- ❖ Tipologi 3 :: adalah Daerah berkembang cepat adalah Kabupaten yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB rata- rata lebih tinggi dari rata- rata pertumbuhan PDRB Jawa Tengah dan pendapatan percapita lebih rendah rata- rata diatas pendapatan percapita Jawa Tengah.
- ❖ Tipologi 4 : Daerah relativ tertinggal adalah Kabupaten yang mempunyai laju rata- rata pertumbuhan PDRB dan pendapatan percapita lebih rendah dar rata- rata laju pertumbuhan dan pendapatan percapita Jawa Tengah.

Hasil yang diharapkan dari analisa ini adalah dapat menentukan tipologi masing- masing kabupaten yang dapat digunakan untuk mendukung dalam menentukan prioritas dalam pengembangan pembangunan wilayah.

3.3.4. Menentukan prioritas sektor basis untuk pengembangan pembangunan di Kabupaten dan Propinsi Jawa Tengah.

Untuk menentukan wilayah yang diprioritaskan dalam pengembangan pembangunan bagi sektor – sektor yang potensial di Kabupaten se Jawa Tengah, menggunakan hasil analisis LQ, Shift – share untuk keunggulan kompetitif dan spesialisasi serta tipologi daerah yang semuanya di buat skore sesuai dengan range yang ada di masing- masing sektor.

3.2. Metode Pengumpulan data :

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi pustaka yaitu dengan menggunakan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang berupa dokumen ataupun arsip yang didapatkan dari kantor statistik Jawa Tengah, Kantor statistik Kabupaten , Bappeda maupun berupa catatan perkuliahan.

3.3. Metode analisis :

3.3.1. Metode LQ

Untuk mengetahui sektor – sektor basis di masing- masing kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah menggunakan rumus *Location Qoution (LQ)* pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di Kabupaten/Kota dengan sektor yang sama di daerah yang lebih luas yaitu Jawa Tengah. Melalui analisis LQ dapat diketahui sektor- sektor yang memiliki kemampuan (potensi) sebagai identifikasi sektor basis dan serta sektor- sektor non basis yang memiliki kecenderungan import dari daerah lain. Adapun analisis yang digunakan adalah melalui data PDRB atas dasar harga konstan dengan rumus :

$$LQ = (L_{ij}/N_{ip}) / (L_j/N_p) \quad (2)$$

Keterangan:

L_{ij} = Nilai tambah sektor I di daerah j (Kabupaten)

L_j = Total nilai tambah sektor di daerah j (Kabupaten)

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Geografis

Jawa Tengah sebagai salah satu propinsi di Jawa, terletak diantara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk pulau Karimunjawa), posisinya diapit oleh tiga propinsi, yaitu Propinsi Jawa timur, Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas geografis sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Timur, sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Jawa Barat, sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan dengan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Indonesia.

Secara administratif terbagi dalam 29 kabupaten dan 6 kota, yang terdiri atas 544 kecamatan, meliputi 8.491 desa/kelurahan dan 31.820 dusun/lingkungan. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2000 adalah 3,25 juta hektar atau sekitar 1,7 persen dari luas wilayah Indonesia atau 25,04 persen dari luas wilayah Pulau Jawa. Luas yang ada terdiri dari 999 ribu hektar (30,7 %) lahan Sawah dan 2,26 juta hektar (69,30 %) bukan lahan sawah. Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah yang paling luas adalah Kabupaten Cilacap yaitu seluas 213.851 hektar atau 6,57 persen dari luas wilayah propinsi. Kabupaten yang paling sempit adalah Kabupaten Kudus, dengan luas wilayah 42.512 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas wilayah propinsi. Kota yang paling luas adalah Kota Semarang dengan luas wilayah 37.367 hektar atau 1,15 persen dari luas propinsi, sedang kota

yang paling sempit adalah Kota Magelang dengan luas wilayah 1.812 hektar atau 0,06 persen dari luas propinsi.

4.2. Demografi

Jumlah penduduk di Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2001 (BPS, 2002) adalah sebesar 31.06 juta jiwa atau 15 persen dari jumlah penduduk Indonesia dan menempati urutan ketiga terbesar dari seluruh propinsi di Pulau Jawa. Penduduk Jawa Tengah belum menyebar secara merata diseluruh wilayah. Umumnya penduduk banyak menumpuk didaerah kota dibandingkan di Kabupaten. Secara rata- rata kepadatan penduduk Jawa Tengah sekitar 954 jiwa setiap kilometer persegi. Wilayah terpadat adalah Kota Surakarta dengan tingkat kepadatan sekita 11 ribu orang per kilometer persegi. Untuk Kabupaten yang terpadat adalah Kabupaten Klaten dengan tingkat kepadatan sekitar seribu sembilan ratus orang per kilometer persegi. Sedang kabupaten yang kepadatan pedudiknya paling rendah adalah Kabupaten Blora dengan tingkat kepadatan 453.45 orang per kilometer persegi dan untuk Kota adalah Kota Salatiga dengan tingkat kepadatan 2.931.34 orang per kilometer persegi. Dari data tersebut terlihat bahwa kepadatan penduduk di daerah perkotaan jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah kabupaten. Kepadatan penduduk dalam kurun waktu enam tahun (1996 – 2001) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, demikian juga dengan jumlah rumah tangga mengalami kenikan sebesar 7,80 juta pada tahun 2000 menjadi 7,99 juta pada tahun 2001 atau mengalami kenaikan sebesar 2,44 %.

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Tingkat Kepadatan Penduduk (per km ²)
1.	Kab. Cilacap	1.613.964	754.71
2.	Kab. Banyumas	1.460.324	1.099.98
3.	Kab. Purbalingga	788.675	1.014.18
4.	Kab. Banjarnegara	838.962	784.18
5.	Kab. Kebumen	1.166.604	909.46
6.	Kab. Purworejo	704.063	680.37
7.	Kab. Wonosobo	739.648	751.16
8.	Kab. Magelang	1.102.359	1.015.32
9.	Kab. Boyolali	897.207	883.89
10.	Kab. Klaten	1.109.486	1.692.42
11.	Kab. Sukoharjo	780.949	1.673.49
12.	Kab. Wonogiri	967.178	530.73
13.	Kab. Karanganyar	761.988	986.78
14.	Kab. Sragen	845.320	893.11
15.	Kab. Grobogan	1.271.500	643.52
16.	Kab. Blora	813.675	453.45
17.	Kab. Rembang	559.523	551.74
18.	Kab. Pati	1.154.506	774.21
19.	Kab. Kudus	709.905	1.669.70
20.	Kab. Jepara	980.443	976.38
21.	Kab. Demak	984.741	1.097.29
22.	Kab. Semarang	834.314	881.14
23.	Kab. Temanggung	665.470	764.71
24.	Kab. Kendal	851.504	849.58
25.	Kab. Batang	665.426	843.43
26.	Kab. Pekalongan	807.051	965.22
27.	Kab. Pemalang	1.271.404	1.256.45
28.	Kab. Tegal	1.391.184	1.581.43
29.	Kab. Brebes	1.711.364	1.032.35
30.	Kota Magelang	116.800	6.445.92
31.	Kota Surakarta	489.900	11.126.50
32.	Kota Salatiga	155.244	2.931.34
33.	Kota Semarang	1.353.047	3.620.97
34.	Kota Pekalongan	263.190	5.853.87
35.	Kota Tegal	236.900	6.868.66
Jumlah		31.063.816	954.51

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah Dalam Angka 2002.

4.3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumberdaya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan .

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) , penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke atas, dan dibedakan sebagai Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Pertumbuhan penduduk setiap tahun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2001 (BPS, 2002) jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah pada tahun 2001 mencapai sebanyak 15.644.732 orang atau naik sekitar 3.41 % dibanding tahun 2000, dimana jumlah angkatan kerja yang sudah bekerja berjumlah 15.066.542 orang, dan jumlah angkatan kerja yang masih mencari pekerjaan berjumlah 578.190 orang (3,70 persen). Sebanyak 70 % angkatan kerja adalah berpendidikan tidak/belum tamat sekolah dasar

Perincian jumlah angkatan kerja per kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2001 berdasarkan Hasil Susenas 2001 Propinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Jumlah Angkatan Kerja di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001
menurut Kabupaten dan Kota

No.	Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja		
		Bekerja	Mencari Kerja	Jumlah
1.	Kab. Cilacap	690.108	40.930	731.038
2.	Kab. Banyumas	658.244	27.756	686.000
3.	Kab. Purbalingga	366.709	14.543	381.252
4.	Kab. Banjarnegara	420.252	12.712	432.964
5.	Kab. Kebumen	521.730	14.562	536.292
6.	Kab. Purworejo	343.721	5.998	349.719
7.	Kab. Wonosobo	393.561	4.018	397.579
8.	Kab. Magelang	561.769	19.275	581.044
9.	Kab. Boyolali	505.872	9.879	515.751
10.	Kab. Klaten	588.210	19.285	607.495
11.	Kab. Sukoharjo	408.720	14.042	422.762
12.	Kab. Wonogiri	559.170	10.404	569.574
13.	Kab. Karanganyar	403.931	9.787	413.716
14.	Kab. Sragen	427.665	12.670	440.335
15.	Kab. Grobogan	659.244	19.196	678.440
16.	Kab. Blora	414.768	5.937	420.705
17.	Kab. Rembang	284.634	6.647	291.281
18.	Kab. Pati	587.974	18.882	606.856
19.	Kab. Kudus	362.180	16.353	378.533
20.	Kab. Jepara	471.412	15.296	486.708
21.	Kab. Demak	465.984	28.162	494.146
22.	Kab. Semarang	446.121	11.360	457.501
23.	Kab. Temanggung	368.967	3.857	372.824
24.	Kab. Kendal	390.640	15.200	405.840
25.	Kab. Batang	301.669	21.781	323.450
26.	Kab. Pekalongan	400.700	12.752	413.452
27.	Kab. Pemalang	569.603	31.356	600.950
28.	Kab. Tegal	603.239	28.904	632.143
29.	Kab. Brebes	777.520	41.372	818.892
30.	Kota Magelang	49.000	3.900	52.900
31.	Kota Surakarta	215.343	17.679	233.022
32.	Kota Salatiga	66.028	8.28	74.256
33.	Kota Semarang	573.949	40.738	614.687
34.	Kota Pekalongan	109.540	6.572	116.112
35.	Kota Tegal	98.365	8.137	106.502
Provinsi		15.066.542	576.190	15.644.732

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah dalam Angka th.2002

Menurut status pekerjaan utamanya, sebagian besar sebagai buruh karyawan yaitu 38,61 % , yang berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga/ buruh

tetap/tidak tercatat sebesar 26,50 % sedang yang berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain sebesar 14,39 % dan pekerja keluarga sebesar 20,49 %.

Dilihat dari lapangan pekerjaannya, sektor pertanian cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sekitar 45 persen tenaga kerja. Sektor-sektor lain yang menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor perdagangan (20,91 persen), sektor industri (15,71 persen) dan sektor jasa (10,98 persen).

4.4. Kondisi Perekonomian Jawa Tengah

Dampak krisis ekonomi nasional sejak pertengahan tahun 1997 ternyata berimbas pula terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Propinsi Jawa Tengah. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebelum terjadi krisis ekonomi cenderung mengalami kenaikan dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1996, namun mengalami penurunan pada tahun 1997 dan 1998 akibat dampak krisis ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 1996 mencapai 7,30 persen, kemudian menurun menjadi sebesar 3,03 persen pada tahun 1997, dan bahkan pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi minus 11,74 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini terjadi pada sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran yang selama ini sektor-sektor tersebut memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB Jawa Tengah.

Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mulai terlihat adanya kenaikan pada tahun 1999 yaitu sebesar 3,49 persen, untuk tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar naik 3,93 persen sedang untuk tahun 2001 laju pertumbuhan ekonomi naik sebesar 3.33 % . Laju Pertumbuhan Ekonomi yang ditunjukkan

dalam Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Propinsi Jawa Tengah Tahun 1996 – 2001 (persen) dapat dilihat pada Tabel. 4.3,

Tabel 4.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993,
Propinsi Jawa Tengah Tahun 1996 – 2001 (persen)

Sektor Ekonomi	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	2	3	4	5	6	
1. Pertanian	3,37	(3,20)	(3,35)	3,07	3,31	1.69
2. Pertambangan dan Penggalan	11,85	11,35	(7,11)	5,49	2,49	8.82
3. Industri Pengolahan	8,71	2,87	(14,61)	2,82	3,19	3.21
4. Listrik, Gas dan Air Minum	14,03	13,47	3,64	10,38	9,66	3.12
5. Bangunan	11,24	6,37	(32,10)	11,93	1,49	2.58
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,35	6,40	(9,00)	3,20	6,71	4.77
7. Pengangkutan dan Komunikasi	12,88	3,61	(0,09)	10,29	5,45	8.13
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,11	7,99	(34,20)	3,77	2,99	1.04
9. Jasa-jasa	4,13	2,64	(9,60)	(0,20)	1,27	1.71
PDRB Total	7,30	3,03	(11,74)	3,39	3,93	3.33

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 2000.

Pada Tabel 4.3. terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB seluruh sektor pada tahun 2001 menunjukkan pertumbuhan positif, sedangkan pada tahun 1998 laju pertumbuhan PDRB semua sektor menunjukkan nilai negatif dikarenakan pada tahun tersebut terjadi puncak krisis ekonomi. Pada tahun 1999 mulai tampak adanya perbaikan perekonomian, dimana pertumbuhan PDRB semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif kecuali untuk sektor Jasa-jasa yang masih menunjukkan pertumbuhan negatif.

Pertumbuhan PDRB pada tahun 2000 untuk sektor Listrik dan Air Bersih menunjukkan pertumbuhan paling besar dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya, dengan pertumbuhan PDRB sebesar 9,66 persen, sedang tahun 2001 sektor pertambangan dan penggalan menunjukkan pertumbuhan paling besar dibandingkan sektor yang lain yaitu sebesar 8,82 % hal ini menunjukkan adanya perubahan laju pertumbuhan antar sektor. Sektor lain yang mempunyai laju pertumbuhan cukup tinggi adalah sektor penangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 8.13 % sedang sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yaitu sebesar 1,04 dan terus menurun mulai tahun 1999 yaitu sebesar 3.37 % , tahun 2000 sebesar 2.99 % .

Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan dan pendapatan perkapita di Jawa Tengah tidak merata untuk setiap Kabupaten dan Kota, karena masing- masing daerah mempunyai keunggulan dan kelemahan masing- masing yang menjadi ciri khas daerah tersebut.

Secara rinci PDRB, Laju pertumbuhan PDRB dan PDRB percapita per kabupaten untuk tahun 2001 dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4

**PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Daerah Kabupaten/Kota Atas Dasar
Harga Konstan Tahun 1993 Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001**

No.	Kabupaten/Kota	PDRB (Juta Rp)	PDRB per kapita (Rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)
1	2	3	4	5
1.	Kab. Cilacap	2.292.319	1.360.407	3.88
2.	Kab. Banyumas	1.040.236	697.250	1.13
3.	Kab. Purbalingga	629.866	746.451	2.98
4.	Kab. Banjarnegara	852.466	983.425	0.15
5.	Kab. Kebumen	915.370	781.480	1.78
6.	Kab. Purworejo	707.550	923.425	3.40
7.	Kab. Wonosobo	527.635	711.699	1.02
8.	Kab. Magelang	1.096.201	988.988	3.90
9.	Kab. Boyolali	935.467	1.011.077	3.30
10.	Kab. Klaten	1.247.746	988.745	4.02
11.	Kab. Skoharjo	1.157.846	1.465.467	4.05
12.	Kab. Wonogiri	804.087	721.600	2.62
13.	Kab. Karanganyar	1.210.084	1.505.022	1.42
14.	Kab. Sragen	712.656	839.962	2.26
15.	Kab. Grobogan	741.821	557.181	4.22
16.	Kab. Blora	693.863	838.768	2.55
17.	Kab. Rembang	524.181	931.356	3.98
18.	Kab. Pati	969.013	823.516	2.99
19.	Kab. Kudus	3.185.768	4.481.264	3.18
20.	Kab. Jepara	1.037.969	1.054.018	4.92
21.	Kab. Demak	769.047	776.345	3.32
22.	Kab. Semarang	1.082.378	1.294.194	3.34
23.	Kab. Temanggung	737.198	1.099.506	4.38
24.	Kab. Kendal	1.594.832	1.810.201	2.86
25.	Kab. Batang	737.198	1.107.765	2.15
26.	Kab. Pekalongan	899.846	1.115.600	4.32
27.	Kab. Pemalang	1.124.314	885.474	3.24
28.	Kab. Tegal	952.070	684.833	4.43
29.	Kab. Brebes	1.447.843	847.699	4.84
30.	Kota Magelang	328.162	2.82.329	3.06
31.	Kota Surakarta	1.353.882	2.453.686	3.93
32.	Kota Salatiga	263.644	1.816.974	3.65
33.	Kota Semarang	5.405.239	4.088.522	5.11
34.	Kota Pekalongan	453.338	1.728.649	4.30
35.	Kota Tegal	377.701	1.568.776	5.22
Jumlah Tanpa Migas		38.799.972		3.53

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 2002.

Pada Tabel 4.4, terlihat bahwa Kabupaten yang mempunyai PDRB Total dan PDRB per kapita terbesar adalah di Kabupaten Kudus dengan nilai PDRB Total sebesar Rp. 3.185.798.250,- dan PDRB per kapita sebesar Rp. 4.481.264.64,-. Hal ini cukup beralasan mengingat potensi industri di Kabupaten Kudus cukup besar, khususnya industri rokok. Sedangkan Kabupaten yang mempunyai PDRB Total terkecil adalah di Kabupaten Rembang sebesar Rp. 524.181.350,-, namun untuk PDRB per kapita terendah adalah Kabupaten Grobogan yang hanya sebesar Rp. 557.181.08,-. Untuk PDRB Total maupun PDRB per kapita Kota yang paling tinggi dicapai oleh Kota Semarang sebesar Rp. 5.4.5.239.760,- dengan PDRB per kapita mencapai Rp. 4.088.522.54,-. PDRB Total Kota terendah berada di Kota Salatiga sebesar Rp. 263.644.760,-, namun PDRB per kapita terendah adalah Kota Tegal yang hanya Rp. 1.568.776.65,-.

Apabila dilihat dari struktur ekonomi Jawa Tengah Tahun 1996 sampai dengan 2001 seperti ditunjukkan pada Tabel 4.5, ternyata sektor Industri Pengolahan masih merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Jawa Tengah, yaitu pada tahun 1996 kontribusinya sebesar 31,84 persen dan pada tahun 2001 sebesar 29.15 persen.

Sektor-sektor lainnya yang memberikan sumbangan terbesar pada tahun 2001 adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Pertanian. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memberikan peranan sebesar 23,86 persen, dan sektor Pertanian memberikan peranan sebesar 22,48 persen. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terkecil atas pembentukan PDRB Jawa Tengah adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, yaitu dengan nilai sebesar 1,20 persen. Seperti terlihat pada Tabel 4.5 dibawah ini

Tabel 4.5
Struktur Ekonomi Jawa Tengah Tahun 1996 – 2001
Atas Dasar Harga Konstan 1993 (persen)

Sektor Ekonomi	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	2	3	4	5	6	7
1. Pertanian	20,27	19,05	20,86	20,78	20,64	22,48
2. Pertambangan dan Penggalan	1,26	1,36	1,43	1,46	1,44	1,52
3. Industri Pengolahan	31,84	31,79	30,76	30,55	30,35	29,15
4. Listrik, Gas dan Air Minum	0,83	0,91	1,07	1,14	1,21	1,20
5. Bangunan	4,81	4,96	3,82	4,13	4,03	3,77
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	21,58	22,29	22,98	22,91	23,53	23,97
7. Pengangkutan dan Komunikasi	4,07	4,10	4,64	4,94	5,01	5,25
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,05	5,29	3,95	3,96	3,92	3,84
9. Jasa-jasa	10,29	10,25	10,50	10,12	9,87	9,71
PDRB Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 2002.

Bila dilihat secara keseluruhan, dalam enam tahun terakhir (tahun 1996 – tahun 2001) seperti pada Tabel 4.5. ternyata belum menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi yang berarti, dimana posisi masing-masing sektor masih tetap.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Sektor – Sektor Basis di masing- masing Kabupaten .

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode LQ dapat diketahui bahwa nilai LQ mulai tahun 1996 sampai 2001 mengalami perubahan yang tidak berarti. Sektor basis untuk tiap Kabupaten cenderung tetap , Tidak banyak sektor yang mengalami perubahan dari sektor bukan basis menjadi sektor basis atau sebaliknya . Hal ini menandakan bahwa pembangunan di Kabupaten- Kabupaten mulai tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 tidak banyak mengalami perubahan. Sektor Basis adalah sektor – sektor yang mempunyai nilai $LQ > 1$ sedang sektor bukan basis adalah sektor – sektor yang mempunyai nilai $LQ < 1$.

Secara lengkap hasil analisis LQ untuk masing- masing sektor selama 6 tahun mulai tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1 Sektor Pertanian

Untuk Sektor pertanian dari 29 kabupaten yang ada di Jawa tengah sebanyak 22 kabupaten yang mempunyai nilai $LQ > 1$ yang berarti sektor pertanian merupakan sektor basis pada 22 kabupaten tersebut seperti pada tabel 5.1

Tabel 5.1.

**Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten untuk Sektor Pertanian
Tahun 1996 – 2001**

No.	Kabupaten	Tahun					
		1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Cilacap	0.59	0.65	0.51	0.53	0.52	0.53
2	Kab. Banyumas.	1.40	1.44	1.35	1.25	1.29	1.23
3	Kab. Purbalingga.	1.70	1.79	1.58	1.54	1.54	1.52
4	Kab. Banjarnegara	2.04	2.18	2.16	1.97	1.95	1.83
5	Kab. Kebumen.	2.12	2.09	1.84	1.80	1.98	1.94
6	Kab. Purworejo.	1.57	1.63	1.67	1.69	1.67	1.65
7	Kab. Wonosobo.	2.64	2.80	2.53	2.69	2.44	2.36
8	Kab. Magelang.	1.86	1.82	1.64	1.57	1.53	1.5
9	Kab. Boyolali.	1.43	1.50	1.54	1.56	1.61	1.53
10	Kab. Klaten.	1.15	1.19	1.10	0.92	0.94	0.91
11	Kab. Sukoharjo.	1.25	1.23	1.20	1.08	1.03	1.02
12	Kab. Wonogiri.	2.26	2.38	2.4	2.42	2.45	2.36
13	Kab. Karanganyar	0.95	0.94	0.90	0.94	0.93	0.99
14	Kab. Sragen.	2.05	1.95	1.91	1.86	1.94	1.88
15	Kab. Grobogan.	2.33	2.22	2.25	2.14	2.21	2.26
16	Kab. Blora.	2.07	2.21	2.16	2.17	2.19	2.24
17	Kab. Rembang.	2.13	2.23	2.21	2.21	2.24	2.3
18	Kab. Pati.	1.99	2.22	2.22	2.17	2.17	2.18
19	Kab. Kudus.	0.15	0.15	0.17	0.16	0.16	0.16
20	Kab. Jepara.	1.39	1.37	1.01	1.05	1.08	1.10
21	Kab. Demak.	1.99	2.06	2.16	2.16	2.15	2.16
22	Kab. Semarang.	0.91	0.93	0.91	0.85	0.88	0.83
23	Kab. Temanggung	1.65	1.67	1.65	1.56	1.57	1.63
24	Kab. Kendal.	1.01	1.01	0.93	0.95	0.98	0.91
25	Kab. Batang.	1.38	1.38	1.34	1.35	1.32	1.29
26	Kab. Pekalongan.	1.01	1.11	0.9	0.91	0.82	0.81
27	Kab. Pemalang.	1.76	1.83	1.71	1.66	1.64	1.62
28	Kab. Tegal.	1.33	1.35	1.36	1.36	1.33	1.30
29	Kab. Brebes	2.45	2.68	2.47	2.51	2.56	2.58

*Sumber : PDRB Tiap Kabupaten Tahun 1996 – 2001 dan PDRB Jawa Tengah tahun
1996 – 2001 (diolah)*

Pada Tabel 5.1 menggambarkan bahwa hasil analisa LQ pada sektor pertanian mulai tahun 1996 – 2001, Kabupaten yang menunjukkan sektor pertanian sebagai sektor basis

adalah Kab. Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Temanggung, Kab. Batang, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, dan Kab. Brebes. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor yang diunggulkan untuk wilayah Jawa Tengah karena 22 dari 29 kabupaten yang ada merupakan sektor basis dan selama periode analisis sektor tersebut memberikan kontribusi PDRB yang lebih besar. Dengan kata lain sektor pertanian ini mempunyai kemampuan terhadap peningkatan perekonomian di kabupaten maupun ditingkat provinsi

5.1.2. Sektor Pertambangan dan penggalian.

Dari hasil analisis LQ untuk sektor pertambangan dan penggalian hanya 9 kabupaten yang menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor basis yaitu Kabupaten Banyumas, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Magelang, Kab. Sragen, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Batang dan Kab. Tegal seperti terlihat pada Tabel 5.2. Untuk Kab. Brebes, pada awal periode menunjukkan nilai $LQ > 1$ untuk sektor ini namun mulai tahun 1998 sektor ini mengalami kemunduran dan tidak lagi menjadi sektor basis.

Tabel 5.2.

Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten untuk Sektor Pertambangan dan Penggalan
Tahun 1996 – 2001

No.	Kabupaten	Tahun					
		1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Cilacap	0.67	0.70	0.55	0.55	0.66	0.69
2	Kab. Banyumas.	1.10	1.05	1.03	1.10	1.09	1.08
3	Kab. Purbalingga.	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23
4	Kab. Banjarnegara	0.41	0.36	0.37	0.37	0.37	0.36
5	Kab. Kebumen.	3.68	3.96	3.70	3.62	3.37	3.31
6	Kab. Purworejo.	2.34	2.08	2.05	1.96	2.26	2.09
7	Kab. Wonosobo.	0.74	0.68	0.72	0.61	0.66	0.68
8	Kab. Magelang.	1.62	1.55	1.56	1.63	1.67	1.58
9	Kab. Boyolali.	0.51	0.48	0.43	0.46	0.45	0.37
10	Kab. Klaten.	0.31	0.31	0.32	0.33	0.34	0.34
11	Kab. Sukoharjo.	1.18	1.16	0.97	1.00	1.02	0.99
12	Kab. Wonogiri.	1.02	0.93	0.83	0.82	0.76	0.75
13	Kab. Karanganyar	0.89	0.85	0.86	0.86	0.83	0.82
14	Kab. Sragen.	1.92	1.82	1.80	1.79	1.62	1.48
15	Kab. Grobogan.	0.91	0.92	0.99	0.97	0.65	0.62
16	Kab. Blora.	4.11	3.62	3.29	3.41	3.52	2.85
17	Kab. Rembang.	2.90	2.74	0.92	1.01	1.13	1.10
18	Kab. Pati.	0.77	0.71	0.55	0.63	0.63	0.57
19	Kab. Kudus.	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
20	Kab. Jepara.	0.50	0.45	0.40	0.41	0.43	0.41
21	Kab. Demak.	0.20	0.20	0.17	0.16	0.17	0.17
22	Kab. Semarang.	0.21	0.19	0.14	0.14	0.12	0.12
23	Kab. Temanggung	1.05	0.95	0.98	0.99	1.00	0.93
24	Kab. Kendal.	0.52	0.43	0.36	0.33	0.33	0.35
25	Kab. Batang.	1.81	1.70	1.8	1.79	1.87	1.75
26	Kab. Pekalongan.	0.74	0.77	0.75	0.73	0.62	0.53
27	Kab. Pemalang.	0.71	0.72	0.72	0.78	0.76	0.89
28	Kab. Tegal.	1.38	1.22	1.12	1.08	1.25	1.26
29	Kab. Brebes	1.06	1.02	0.98	0.96	0.98	0.92

Sumber : PDRB Tiap Kabupaten Tahun 1996 – 2001 dan PDRB Jawa Tengah tahun
1996 – 2001 (diolah)

5.1.3 Sektor Industri

Tabel 5.3. menunjukkan hasil analisa LQ pada sektor Industri sebagai berikut :

Tabel 5.3.
Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten untuk Sektor Industri
Tahun 1996 – 2001

No.	Kabupaten	Tahun					
		1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Cilacap	1.44	1.42	1.58	1.59	1.62	1.61
2	Kab. Banyumas.	0.54	0.55	0.61	0.62	0.61	0.62
3	Kab. Purbalingga.	0.33	0.25	0.36	0.36	0.37	0.39
4	Kab. Banjarnegara	0.52	0.51	0.49	0.49	0.48	0.51
5	Kab. Kebumen.	0.22	0.26	0.32	0.31	0.31	0.31
6	Kab. Purworejo.	0.25	0.23	0.25	0.24	0.24	0.25
7	Kab. Wonosobo.	0.15	0.16	0.20	0.22	0.26	0.28
8	Kab. Magelang.	0.6	0.62	0.64	0.66	0.66	0.67
9	Kab. Boyolali.	0.69	0.69	0.63	0.62	0.57	0.56
10	Kab. Klaten.	0.65	0.67	0.70	0.74	0.76	0.77
11	Kab. Sukoharjo.	0.94	0.96	0.83	0.86	0.86	0.86
12	Kab. Wonogiri.	0.19	0.19	0.16	0.14	0.15	0.16
13	Kab. Karanganyar	1.28	1.30	1.22	1.23	1.27	1.23
14	Kab. Sragen.	0.49	0.59	0.57	0.57	0.56	0.57
15	Kab. Grobogan.	0.91	0.92	0.99	0.97	0.65	0.62
16	Kab. Blora.	0.19	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20
17	Kab. Rembang.	0.18	0.37	0.19	0.18	0.18	0.18
18	Kab. Pati.	0.51	0.46	0.40	0.40	0.43	0.45
19	Kab. Kudus.	1.94	0.93	0.99	2.00	1.99	1.98
20	Kab. Jepara.	0.75	0.79	0.98	0.92	0.91	0.91
21	Kab. Demak.	0.46	0.48	0.36	0.37	0.38	0.38
22	Kab. Semarang.	1.31	1.34	1.36	1.37	1.36	1.38
23	Kab. Temanggung	0.52	0.64	0.53	0.55	0.55	0.54
24	Kab. Kendal.	1.36	1.44	1.5	1.49	1.46	1.48
25	Kab. Batang.	0.9	0.94	0.98	0.96	0.97	0.97
26	Kab. Pekalongan.	0.94	0.95	1.02	1.01	1.05	1.06
27	Kab. Pemalang.	0.55	0.58	0.61	0.62	0.64	0.67
28	Kab. Tegal.	0.66	0.68	0.65	0.65	0.65	0.68
29	Kab. Brebes	0.3	0.31	0.33	0.33	0.33	0.34

Sumber : PDRB Tiap Kabupaten Tahun 1996 – 2001 dan PDRB Jawa Tengah tahun 1996 – 2001 (diolah)

Pada Tabel 5.3. dari 29 kabupaten ada 6 kabupaten yang mempunyai $LQ > 1$ yaitu Kabupaten Cilacap, Kab. Karanganyar, Kab. Kudus, Kab. Semarang, Kab Kendal dan Kab. Pekalongan. Walaupun sektor industri ini hanya didukung oleh 6 kabupaten sebagai sektor basis tapi sumbangan terhadap PDRB Jawa Tengah ternyata memberikan yang tertinggi . Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri dari 6 kabupaten tersebut cukup berperan dalam pembentukan PDRB di Jawa Tengah.

5.1.4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.

Hasil analisa LQ pada sektor Listrik, Gas dan Air Bersih seperti digambarkan pada tabel 5.4. Bahwa sektor Listrik, Gas dan Air Bersih merupakan sektor basis pada 8 kabupaten yaitu kab. Banyumas, Kab. Wonosobo, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Pati, Kab. Semarang dan Kab. Temanggung. Dalam pembentukan PDRB di Jawa Tengah sektor ini memberikan kontribusi terendah yaitu sekitar 1,2 % dari jumlah PDRB seluruhnya. Hal ini dimungkinkan karena sektor ini belum sepenuhnya dikelola dengan optimal. Sedang 21 kabupaten yang lain mempunyai nilai $LQ < 1$.

Secara rinci hasil analisis LQ pada sektor Listrik, Gas dan Air Bersih seperti pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4.

**Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten untuk Sektor Listrik, Gas
dan Air bersih Tahun 1996 – 2001**

No.	Kabupaten	Tahun					
		1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Cilacap	0.39	0.49	0.45	0.44	0.44	0.44
2	Kab. Banyumas.	1.07	1.36	1.14	1.18	1.19	1.22
3	Kab. Purbalingga.	0.48	0.63	0.6	0.64	0.68	0.7
4	Kab. Banjarnegara	0.39	0.35	0.34	0.35	0.37	0.4
5	Kab. Kebumen.	0.86	0.93	0.97	0.94	0.66	0.68
6	Kab. Purworejo.	0.89	0.93	0.90	0.90	0.94	0.94
7	Kab. Wonosobo.	1.12	1.06	1.15	1.14	1.2	1.33
8	Kab. Magelang.	0.41	0.43	0.44	0.44	0.47	0.48
9	Kab. Boyolali.	0.72	0.64	0.56	0.6	0.71	0.84
10	Kab. Klaten.	0.79	0.7	0.76	0.76	0.78	0.78
11	Kab. Sukoharjo.	0.99	1.16	0.91	0.95	0.97	1.11
12	Kab. Wonogiri.	0.66	0.68	0.66	0.64	0.65	0.79
13	Kab. Karanganyar	1.77	1.57	1.43	1.39	1.36	1.43
14	Kab. Sragen.	0.97	1.00	0.96	0.89	1.00	1.12
15	Kab. Grobogan.	0.7	0.78	0.63	0.60	0.48	0.47
16	Kab. Blora.	0.57	0.55	0.53	0.50	0.49	0.51
17	Kab. Rembang.	0.72	0.69	0.57	0.56	0.56	0.56
18	Kab. Pati.	1.33	1.34	1.29	1.41	1.45	1.59
19	Kab. Kudus.	0.58	0.6	0.53	0.57	0.53	0.62
20	Kab. Jepara.	0.51	0.52	0.54	0.58	0.63	0.7
21	Kab. Demak.	0.51	0.49	0.49	0.5	0.48	0.49
22	Kab. Semarang.	1.47	1.30	1.36	1.27	1.26	1.32
23	Kab. Temanggung	0.9	0.83	0.84	0.9	0.94	0.98
24	Kab. Kendal.	1.31	1.49	1.62	1.68	1.67	1.71
25	Kab. Batang.	0.42	0.42	0.41	0.44	0.47	0.54
26	Kab. Pekalongan.	0.41	0.40	0.96	0.70	0.75	0.76
27	Kab. Pemalang.	0.87	0.8	0.78	0.82	0.86	0.96
28	Kab. Tegal.	0.45	0.46	0.49	0.49	0.48	0.49
29	Kab. Brebes	0.79	0.95	0.93	0.93	0.91	0.95

*Sumber : PDRB Tiap Kabupaten Tahun 1996 – 2001 dan PDRB Jawa Tengah tahun
1996 – 2001 (diolah)*

5.1.5. Sektor Bangunan

Hasil analisis LQ untuk sektor bangunan seperti yang ditunjukkan pada tabel 5.5.

Tabel 5.5.

**Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten untuk Sektor Bangunan
Tahun 1996 – 2001**

No.	Kabupaten	Tahun					
		1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Cilacap	0.26	0.29	0.29	0.25	0.44	0.44
2	Kab. Banyumas.	1.00	0.99	0.88	0.85	0.87	0.89
3	Kab. Purbalingga.	1.06	1.11	1.22	1.13	1.16	1.20
4	Kab. Banjarnegara	1.48	1.15	1.49	1.35	1.39	1.51
5	Kab. Kebumen.	0.60	0.57	0.58	0.55	0.48	0.48
6	Kab. Purworejo.	1.46	1.41	1.35	1.22	1.19	1.26
7	Kab. Wonosobo.	1.91	1.74	1.84	1.3	1.13	1.11
8	Kab. Magelang.	1.08	1.05	1.34	1.18	1.29	1.34
9	Kab. Boyolali.	0.51	0.47	0.61	0.57	0.63	0.70
10	Kab. Klaten.	1.66	1.63	1.93	1.95	2.00	2.11
11	Kab. Sukoharjo.	0.85	0.85	0.87	0.89	0.98	1.05
12	Kab. Wonogiri.	1.03	1.01	0.75	0.74	0.73	0.73
13	Kab. Karanganyar	0.55	0.54	0.60	0.57	0.59	0.61
14	Kab. Sragen.	1.32	1.32	1.30	1.22	0.94	0.95
15	Kab. Grobogan.	1.82	2.36	1.98	1.56	0.99	1.01
16	Kab. Blora.	1.33	1.25	0.86	0.79	0.81	0.78
17	Kab. Rembang.	0.97	0.95	0.83	0.75	0.77	0.80
18	Kab. Pati.	0.81	0.74	0.75	0.70	0.72	0.70
19	Kab. Kudus.	0.25	0.28	0.24	0.22	0.23	0.23
20	Kab. Jepara.	0.82	0.79	0.72	0.74	0.82	0.87
21	Kab. Demak.	0.78	0.74	0.71	0.66	0.69	0.71
20	Kab. Semarang.	1.25	1.21	0.49	0.45	0.4	0.42
23	Kab. Temanggung	1.48	1.34	1.73	1.65	1.71	1.74
24	Kab. Kendal.	1.69	0.55	0.42	0.42	0.45	0.48
25	Kab. Batang.	0.76	0.75	0.89	0.87	1.05	1.11
26	Kab. Pekalongan.	1.05	0.78	1.22	1.3	1.22	1.17
27	Kab. Pemalang.	1.08	1.00	0.9	0.84	0.83	0.78
28	Kab. Tegal.	1.09	1.00	0.87	0.82	0.89	0.96
29	Kab. Brebes	0.95	0.66	0.64	0.55	0.48	0.49

Sumber : PDRB Tiap Kabupaten Tahun 1996 – 2001 dan PDRB Jawa Tengah tahun 1996 – 2001 (diolah)

Seperti yang terlihat pada Tabel 5.5. bangunan merupakan sektor basis untuk 11 kabupaten yaitu Kabupaten Purbalingga, Kab.Banjarnegara, Kab.Purworejo, Kab.Wonosobo, Kab.Klaten, Kab.Sukoharjo, Kab.Blora,Kab.Temanggung. Kab.Batang dan Kab. Pekalongan. Pada sektor ini banyak mengalami perubahan dari sektor basis menjadi sektor yang bukan basis yaitu untuk kabupaten Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Wonogiri, kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab. Pemalang dan Kab. Tegal. Sedang Kabupaten yang lain mempunyai nilai $LQ < 1$ sehingga bukan merupakan sektor basis.

5.1.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.

Menurut hasil analisis LQ sektor perdagangan, Hotel dan Restoran ternyata hanya 6 kabupaten yang mempunyai nilai $LQ > 1$ yang berarti merupakan sektor basis. Sedang 23 Kabupaten yang lain mempunyai nilai $LQ < 1$. Enam kabupaten tersebut adalah Kab. Cilacap, Kab.Boyolali, Kab.Klaten, , Kab.Sukoharjo, Kab.Kudus, Kab.Tegal.

Sektor perdagangan ini juga sangat berpengaruh dalam pembentukan PDRB di Jawa Tengah karena walaupun hanya didukung oleh 6 kabupaten tapi memberikan kontribusi terhadap PDRB Jawa Tengah cukup besar yaitu sekitar 23.97 %. Dari jumlah PDRB seluruhnya.

Secara rinci hasil analisis LQ untuk sektor perdagangan, Hotel dan Restoran dapat dilihat pada Tabel 5.6. dibawah ini

Tabel 5.6.

Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten untuk Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran Tahun 1996 – 2001

No.	Kabupaten	Tahun					
		1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Cilacap	1.57	1.48	1.44	1.44	1.38	1.37
2	Kab. Banyumas.	0.6	0.59	0.6	0.6	0.6	0.6
3	Kab. Purbalingga.	0.82	0.79	0.75	0.75	0.73	0.74
4	Kab. Banjarnegara	0.62	0.58	0.56	0.54	0.52	0.52
5	Kab. Kebumen.	0.76	0.78	0.78	0.79	0.64	0.63
6	Kab. Purworejo.	0.82	0.76	0.81	0.8	0.77	0.76
7	Kab. Wonosobo.	0.56	0.55	0.62	0.61	0.75	0.77
8	Kab. Magelang.	0.64	0.63	0.63	0.63	0.62	0.64
9	Kab. Boyolali.	1.24	1.2	1.18	1.17	1.11	1.09
10	Kab. Klaten.	1.28	1.22	1.13	1.19	1.14	1.13
11	Kab. Sukoharjo.	0.89	0.9	0.99	1.02	1.03	1.03
12	Kab. Wonogiri.	0.66	0.62	0.52	0.51	0.49	0.48
13	Kab. Karanganyar	0.73	0.74	0.78	0.77	0.74	0.73
14	Kab. Sragen.	0.68	0.68	0.65	0.66	0.64	0.63
15	Kab. Grobogan.	0.83	0.79	0.88	0.87	0.89	0.87
16	Kab. Blora.	0.77	0.77	0.75	0.75	0.72	0.72
17	Kab. Rembang.	0.75	0.47	0.72	0.75	0.74	0.73
18	Kab. Pati.	0.74	0.71	0.67	0.65	0.65	0.64
19	Kab. Kudus.	1.25	1.21	1.17	1.17	1.17	1.15
20	Kab. Jepara.	1.02	0.99	1.06	1.02	0.98	0.96
21	Kab. Demak.	0.93	0.92	0.89	0.89	0.87	0.86
22	Kab. Semarang.	0.8	0.78	0.77	0.78	0.75	0.74
23	Kab. Temanggung	0.55	0.47	0.38	0.4	0.42	0.42
24	Kab. Kendal.	0.85	0.81	0.76	0.77	0.73	0.74
25	Kab. Batang.	0.88	0.86	0.78	0.78	0.75	0.73
26	Kab. Pekalongan.	0.94	0.92	0.91	0.89	0.89	0.89
27	Kab. Pemalang.	1.00	0.97	0.95	0.97	0.94	0.93
28	Kab. Tegal.	1.01	1.06	1.04	1.04	1.03	1.02
29	Kab. Brebes	0.98	0.97	0.97	0.97	0.94	0.93

Sumber : PDRB Tiap Kabupaten Tahun 1996 – 2001 dan PDRB Jawa Tengah tahun 1996 – 2001 (diolah)

5.1.7. Sektor Pengangkutan dan komunikasi

Hasil analisis sektor Pengangkutan dan komunikasi seperti pada tabel 5.7.

Tabel 5.7.

Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten untuk Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Tahun 1996 – 2001

No.	Kabupaten	Tahun					
		1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Cilacap	0.28	0.35	0.32	0.3	0.28	0.26
2	Kab. Banyumas.	1.84	1.90	1.84	1.92	1.88	1.84
3	Kab. Purbalingga.	1.24	1.45	1.31	1.3	1.29	1.24
4	Kab. Banjarnegara	0.83	1.05	0.93	0.99	0.91	0.93
5	Kab. Kebumen.	0.87	0.89	0.92	0.83	0.87	0.86
6	Kab. Purworejo.	0.97	0.94	1.10	1.09	1.18	1.24
7	Kab. Wonosobo.	1.52	1.48	1.44	1.19	1.27	1.30
8	Kab. Magelang.	1.35	1.51	1.4	1.4	1.39	1.34
9	Kab. Boyolali.	0.83	0.91	1.05	0.97	1.03	1.01
10	Kab. Klaten.	0.76	0.8	0.76	0.76	0.73	0.73
11	Kab. Sukoharjo.	0.70	0.76	0.70	0.72	0.72	0.69
12	Kab. Wonogiri.	2.06	2.09	1.82	1.78	1.73	1.80
13	Kab. Karanganyar	0.64	0.63	0.62	0.57	0.55	0.53
14	Kab. Sragen.	0.89	1.02	0.95	0.91	0.91	0.93
15	Kab. Grobogan.	0.69	0.82	0.76	0.80	0.79	0.74
16	Kab. Blora.	0.92	0.95	0.79	0.74	0.71	0.69
17	Kab. Rembang.	1.84	1.85	1.52	1.41	1.40	1.31
18	Kab. Pati.	0.93	0.95	0.87	0.81	0.82	0.76
19	Kab. Kudus.	0.35	0.37	0.35	0.35	0.35	0.33
20	Kab. Jepara.	1.64	1.76	1.70	1.71	1.68	1.68
21	Kab. Demak.	0.93	0.96	0.84	0.81	0.82	0.8
22	Kab. Semarang.	0.51	0.55	0.57	0.55	0.56	0.56
23	Kab. Temanggung	1.15	1.17	1.15	1.14	1.17	1.13
24	Kab. Kendal.	0.53	0.47	0.46	0.43	0.47	0.45
25	Kab. Batang.	0.54	0.54	0.52	0.50	0.52	0.50
26	Kab. Pekalongan.	1.03	1.11	1.15	0.89	0.89	0.87
27	Kab. Pemalang.	0.83	0.82	0.75	0.74	0.74	0.72
28	Kab. Tegal.	1.48	1.36	0.96	0.91	0.88	0.83
29	Kab. Brebes	0.39	0.38	0.33	0.30	0.29	0.30

Sumber : PDRB Tiap Kabupaten Tahun 1996 – 2001 dan PDRB Jawa Tengah tahun 1996 – 2001 (diolah)

Pada Tabel 5.7 menunjukkan bahwa Dari 29 kabupaten yang ada sebanyak 10 kabupaten yang mempunyai nilai $LQ > 1$ berarti pada sektor Pengangkutan dan komunikasi ini merupakan sektor basis untuk 10 kabupaten tersebut. Kabupaten – kabupaten dimaksud adalah Kab. Banyumas, Kab.Purbalingga, Kab.Purworejo, Kab.wonosobo, Kab..Magelang , Kab.Boyolali, Kab.Wonogiri, Kab.Rembang, Kab.Jepara, dan Kab.Temanggung, sedang kabupaten yang lain karena mempunyai nilai LQ kurang dari 1 maka bukan merupakan sektor basis.

5.1.8. Sektor keuangan, Sewa dan Jasa perusahaan.

Untuk sektor Keuangan, Sewa dan Jasa perusahaan ditunjukkan pada Tabel 5.8. Sektor ini merupakan sektor basis untuk 22 Kabupaten sedang 7 kabupaten yang lain tidak menunjukkan sektor ini sebagai sektor basis. Walaupun didukung oleh 22 kabupaten diseluruh Jawa Tengah tapi hanya memberikan kontribusi terhadap PDRB Jawa Tengah sebanyak 3.84 % . 22 kabupaten yang dimaksud adalah kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kan. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Jepara, Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal.

Secara rinci hasil analisis LQ pada sektor keuangan, Sewa dan Jasa perusahaan ditunjukkan pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8.

Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten untuk Sektor Keuangan, Sewa dan
Jasa Perusahaan , Tahun 1996 – 2001

No.	Kabupaten	Tahun					
		1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Cilacap	0.29	0.34	0.32	0.28	0.29	0.29
2	Kab. Banyumas.	1.67	1.58	1.98	2.15	2.14	2.27
3	Kab. Purbalingga.	0.77	0.78	1.03	1.05	1.08	1.10
4	Kab. Banjarnegara	0.88	0.84	0.92	1.11	1.16	1.34
5	Kab. Kebumen.	0.80	0.78	1.14	1.26	1.38	1.43
6	Kab. Purworejo.	0.97	0.94	1.10	1.09	1.18	1.24
7	Kab. Wonosobo.	1.01	0.9	1.01	0.89	1.02	1.11
8	Kab. Magelang.	0.86	0.82	1.03	1.02	1.01	1.02
9	Kab. Boyolali.	1.00	0.96	1.27	1.29	1.4	1.55
10	Kab. Klaten.	1.11	1.02	1.29	1.32	1.32	1.35
11	Kab. Sukoharjo.	0.87	0.81	1.12	1.13	1.17	1.22
12	Kab. Wonogiri.	1.02	1.04	1.29	1.27	1.24	1.28
13	Kab. Karanganyar	0.70	0.63	0.88	0.84	0.85	0.87
14	Kab. Sragen.	1.00	0.99	1.06	1.08	1.11	1.18
15	Kab. Grobogan.	0.78	0.77	0.71	0.84	1.03	1.08
16	Kab. Blora.	1.45	1.35	1.75	1.77	1.81	1.91
17	Kab. Rembang.	1.08	1.03	1.41	1.38	1.34	1.34
18	Kab. Pati.	1.72	1.59	2.05	2.00	2.07	2.11
19	Kab. Kudus.	0.43	0.43	0.61	0.72	0.69	0.80
20	Kab. Jepara.	1.05	1.07	1.18	1.24	1.24	1.29
21	Kab. Demak.	0.65	0.63	0.60	0.84	0.88	0.91
22	Kab. Semarang.	0.73	0.68	0.98	0.98	0.98	1.01
23	Kab. Temanggung	1.04	0.97	1.29	1.38	1.25	1.27
24	Kab. Kendal.	0.49	0.48	0.68	0.62	0.68	0.72
25	Kab. Batang.	0.73	0.71	0.89	0.80	0.82	0.86
26	Kab. Pekalongan.	1.07	1.07	1.26	1.31	1.35	1.36
27	Kab. Pemasang.	1.12	1.05	1.32	1.30	1.32	1.37
28	Kab. Tegal.	1.17	1.14	1.68	1.76	1.91	1.94
29	Kab. Brebes	0.95	0.80	1.03	1.00	0.96	0.96

Sumber : PDRB Tiap Kabupaten Tahun 1996 – 2001 dan PDRB Jawa Tengah tahun
1996 – 2001 (diolah)

5.1.9. Sektor Jasa – Jasa

Hasil analisis LQ sektor Jasa – Jasa seperti pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9.

**Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten untuk Sektor Jasa
Tahun 1996 – 2001**

No.	Kabupaten	Tahun					
		1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Cilacap	0.31	0.32	0.23	0.24	0.24	0.26
2	Kab. Banyumas.	1.80	1.78	1.60	1.67	1.67	1.74
3	Kab. Purbalingga.	2.22	2.34	2.20	2.3	2.35	2.38
4	Kab. Banjarnegara	1.24	1.38	1.20	1.58	1.72	1.64
5	Kab. Kebumen.	1.70	1.72	1.57	1.71	1.77	1.90
6	Kab. Purworejo.	2.23	2.43	2.00	2.04	2.07	2.10
7	Kab. Wonosobo.	0.70	0.78	0.64	0.64	0.70	0.73
8	Kab. Magelang.	1.15	1.30	1.24	1.38	1.50	1.58
9	Kab. Boyolali.	0.99	1.00	0.77	0.81	0.85	0.99
10	Kab. Klaten.	1.04	1.07	1.19	1.24	1.26	1.26
11	Kab. Sukoharjo.	1.15	1.15	1.27	1.35	1.36	1.37
12	Kab. Wonogiri.	1.31	1.33	1.41	1.46	1.52	1.70
13	Kab. Karanganyar	1.25	1.26	1.36	1.38	1.37	1.38
14	Kab. Sragen.	0.94	0.95	0.99	1.14	1.16	1.32
15	Kab. Grobogan.	1.42	1.52	1.23	1.54	1.64	1.64
16	Kab. Blora.	1.20	1.18	1.19	1.22	1.23	1.25
17	Kab. Rembang.	1.25	1.27	1.33	1.35	1.35	1.34
18	Kab. Pati.	0.87	0.88	0.87	1.04	0.93	0.93
19	Kab. Kudus.	0.25	0.27	0.26	0.26	0.27	0.27
20	Kab. Jepara.	0.85	0.87	0.76	0.89	0.90	0.92
21	Kab. Demak.	1.30	1.29	1.22	1.27	1.28	1.30
22	Kab. Semarang.	0.92	0.91	1.08	1.23	1.31	1.39
23	Kab. Temanggung	1.86	1.82	2.01	2.10	2.11	2.08
24	Kab. Kendal.	0.78	0.75	0.75	0.83	0.90	0.95
25	Kab. Batang.	1.19	1.19	1.11	1.21	1.25	1.35
26	Kab. Pekalongan.	1.29	1.23	1.15	1.28	1.40	1.44
27	Kab. Pemalang.	0.93	0.92	0.92	0.97	1.00	1.02
28	Kab. Tegal.	1.06	1.02	1.06	1.09	1.09	1.08
29	Kab. Brebes	0.67	0.61	0.55	0.54	0.53	0.55

Sumber : PDRB Tiap Kabupaten Tahun 1996 – 2001 dan PDRB Jawa Tengah tahun 1996 – 2001 (diolah)

Seperti yang ditunjukkan Tabel 5.9 ,kabupaten yang mempunyai nilai $LQ > 1$ sebanyak 21 kabupaten, 8 kabupaten yang mempunyai $LQ < 1$.Untuk sektor Jasa – Jasa ini merupakan sektor basis untuk kabupaten - kabupaten kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kan. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Magelang, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang. Kab. Demak, Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal.

Dari semua sektor (9 Sektor) dan seluruh kabupaten (29 Kabupaten) ada beberapa kabupaten yang mempunyai lebih dari 1 sektor basis namun ada pula kabupaten yang hanya mempunyai 1 sektor basis saja. Kabupaten yang paling banyak mempunyai sektor basis adalah Kab. Banyumas, Kab. Purworejo,kab.Magelang dan Kab. Sukoharjo yaitu kabupaten yang mempunyai sektor basis sebanyak 6 sektor. Sedang kabupaten yang mempunyai paling sedikit sektor basis adalah kabupaten Brebes yang hanya mempunyai 1 buah sektor basis dan yang lain Kab. Kendal, Kab.Demak, Kab. Kudus dan Kab. Cilacap yang hanya mempunyai 2 sektor basis. Secara rinci kompilasi analisis LQ untuk 29 kabupaten seperti terlihat pada Tabel 5.10

Tabel 5.10.

Hasil kompilasi analisis LQ di Jawa Tengah

No	Kabupaten	Sektor									Jumlah sektor basis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Cilacap			v			v				2
2	Banyumas.	v	v		v			v	v	v	6
3	Purbalingga.	v				v		v	v	v	5
4	Banjarnegara	v				v			v	v	4
5	Kebumen.	v	v						v	v	4
6	Purworejo.	v	v			v		v	v	v	6
7	Wonosobo.	v			v	v		v	v		5
8	Magelang.	v	v			v		v	v	v	6
9	Boyolali.	v					v	v	v		4
10	Klaten.					v	v		v	v	4
11	Sukoharjo.	v			v	v	v		v	v	6
12	Wonogiri.	v						v	v	v	4
13	Karanganyar			v	v					v	3
14	Sragen.	v	v		v				v	v	5
15	Grobogan.	v							v	v	3
16	Blora.	v	v			v			v	v	5
17	Rembang.	v	v					v	v	v	5
18	Pati.	v			v				v		3
19	Kudus.			v			v				2
20	Jepara.	v						v	v		3
21	Demak.	v								v	2
22	Semarang.			v	v				v	v	4
23	Temanggung	v			v	V		v	v		5
24	Kendal.			v						v	2
25	Batang.	v	v			V				v	4
26	Pekalongan.			v		V			v	v	4
27	Pemalang.	v							v	v	3
28	Tegal.	v	v				v		v	v	5
29	Brebes	v									1
	Jumlah	22	9	6	8	11	6	10	22	21	

Sumber : Hasil analisis LQ per sektor

5.2. Analisis Kinerja sektor – sektor perekonomian terutama untuk Sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi.

Untuk menentukan sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi menggunakan analisis *shift – share*. Hasil analisis persektor adalah sebagai berikut :

5.2.1. Sektor Pertanian.

Dari hasil analisis Shift- Share, Kabupaten yang mempunyai keunggulan kompetitif untuk sektor pertanian sebanyak 12 Kabupaten yaitu kabupaten Cilacap, Kab. Purworejo, Kab. Magelang, Kab. Wonogiri, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Demak, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Brebes. Berarti tidak semua kabupaten yang merupakan sektor basis mempunyai keunggulan kompetitif. Sedangkan kabupaten yang mempunyai spesialisasi dalam sektor ini sebanyak 26 kabupaten, 3 kabupaten yang tidak mempunyai spesialisasi adalah Kab. Cilacap, Kab. Kudus dan Kab. Semarang, Secara rinci hasil analisis *shift- share* tentang keunggulan kompetitif dan spesialisasi untuk Sektor pertanian dijelaskan pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11

**Hasil Analisis Shift- Share tentang Keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi
untuk Sektor Pertanian.**

No.	Kabupaten	Kompetitif	Spesialisasi
1	Cilacap	0.120	-449276.55
2	Banyumas.	-0.112	82273.23
3	Purbalingga	-0.113	88522.35
4	Banjarnegara	-0.133	184033.40
5	Kebumen.	-0.149	220760.06
6	Purworejo.	0.081	78895.12
7	Wonosobo.	-0.190	191029.40
8	Magelang.	-0.146	179040.08
9	Boyolali.	0.049	82155.28
10	Klaten.	-0.226	37194.20
11	Sukoharjo.	-0.200	58482.61
12	Wonogiri.	0.097	194315.29
13	Karanganyar	0.028	-11063.22
14	Sragen.	-0.096	152641.31
15	Grobogan.	-0.101	213563.33
16	Blora.	0.100	152775.88
17	Rembang.	0.123	114215.05
18	Pati.	0.140	186181.05
19	Kudus.	-0.011	-588725.23
20	Jepara.	-0.106	71626.41
21	Demak.	0.099	151768.51
22	Semarang.	-0.151	-21476.43
23	Temanggung	0.044	89789.32
24	Kendal.	-0.094	3895.11
25	Batang.	-0.085	56849.32
26	Pekalongan.	-0.172	1746.24
27	Pemalang.	0.026	153719.32
28	Tegal.	0.050	58436.34
29	Brebes	0.294	343880.35
		-0.834	2077247.13

Sumber: PDRB Kabupaten dan PDRB Jawa Tengah Tahun 1996 dan 2001 (Diolah)

5.2.2. Sektor Pertambangan dan penggalian .

Keunggulan kompetitif dan Spesialisasi untuk sektor pertambangan dan penggalian dijelaskan dalam Tabel 5.12 dibawah ini :

Tabel 5.12.

Hasil Analisis Shift- Share tentang Keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi Untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian

No	Kabupaten	Kompetitif	Spesialisasi
1	Cilacap	0.343	-22521.89
2	Banyumas.	-0.008	1246.33
3	Purbalingga	-0.038	-6040.8
4	Banjarnegara	-0.178	-6419.11
5	Kebumen.	-0.191	32659.8
6	Purworejo.	-0.1	11505.63
7	Wonosobo.	-0.205	-1868.69
8	Magelang.	0.042	8043.11
9	Boyolali.	-0.354	-5859.67
10	Klaten.	0.066	-10918.5
11	Sukoharjo.	-0.214	2640.66
12	Wonogiri.	-0.272	190.73
13	Karanganyar	-0.105	-1749.46
14	Sragen.	-0.292	8317.85
15	Grobogan.	-0.446	-923.81
16	Blora.	-0.357	27573.62
17	Rembang.	-0.735	11922.72
18	Pati.	-0.282	-2694.73
19	Kudus.	-0.138	-41666.08
20	Jepara.	-0.087	-5691.52
21	Demak.	-0.214	-7551.04
22	Semarang.	-0.592	-11511.2
23	Temanggung	-0.083	458.22
24	Kendal.	-0.403	-9451.71
25	Batang.	-0.065	7612.94
26	Pekalongan.	-0.316	-2782.06
27	Pemalang.	0.458	-3610.95
28	Tegal.	-0.032	4246.46
29	Brebes	0.082	835.61
		-4.716	-24007.54

Sumber: PDRB Kabupaten dan PDRB Jawa Tengah Tahun 1996 dan 2001 (Diolah)

Dari Tabel 5.12. terlihat bahwa kabupaten yang mempunyai keunggulan kompetitif pada sektor pertambangan dan penggalian sebanyak 5 Kabupaten yaitu Kab. Cilacap, Kab. Magelang, Kab. Klaten, Kab. Pemalang dan Kab. Brebes. Dari 9 kabupaten yang merupakan sektor basis hanya 1 kabupaten yang mempunyai keunggulan kompetitif yaitu Kab. Magelang. Kabupaten yang mempunyai spesialisasi sebanyak 13 Kabupaten yaitu Kab. Banyumas, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Magelang, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Rembang, Kab. Temanggung, Kab. Batang, Kab. Tegal dan Kab. Brebes.

5.2.3. Sektor Industri

Dari hasil analisis shift – share untuk Sektor Industri sebanyak 20 kabupaten yang mempunyai keunggulan kompetitif. Kabupaten yang tidak mempunyai keunggulan kompetitif adalah Kab. Banjarnegara, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Demak, Kab. Semarang. Dibandingkan dengan kabupaten kabupaten yang merupakan sektor basis maka ada 2 kabupaten yang merupakan sektor basis tapi tidak mempunyai keunggulan kompetitif yaitu Kab. Kudus dan Kab. Semarang. Sedangkan untuk Spesialisasi hanya 5 kabupaten yaitu Kab. Cilacap, Kab. Karanganyar, Kab. Kudus, Kab. Semarang, Kab. Kendal. Hampir seluruh kabupaten yang merupakan sektor basis mempunyai spesialisasi.

Secara rinci hasil analisis shift – share tentang keunggulan kompetitif dan spesialisasi untuk sektor Industri dapat dilihat pada Tabel 5.13 dibawah ini.

Tabel 5.13.

**Hasil Analisis Shift- Share tentang Keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi
Untuk Sektor Industri**

No.	Kabupaten	Kompetitif	Spesialisasi
1	Cilacap	0.379	759592.02
2	Banyumas.	0.152	-148844.34
3	Purbalingga	0.165	-134629.16
4	Banjarnegara	-0.047	-132377.98
5	Kebumen.	0.28	-239367.07
6	Purworejo.	0.014	-162162.35
7	Wonosobo.	0.69	-155616.38
8	Magelang.	0.181	-131220.84
9	Boyolali.	-0.17	-94303.6
10	Klaten.	0.152	-139915.74
11	Sukoharjo.	-0.099	-20712.57
12	Wonogiri.	-0.131	-195677.41
13	Karanganyar	-0.042	106910.85
14	Sragen.	0.133	-115562.51
15	Grobogan.	0.195	-227659.87
16	Blora.	0.112	-182294.24
17	Rembang.	0.013	-129669.89
18	Pati.	-0.081	-143800.8
19	Kudus.	-0.057	1029014.57
20	Jepara.	0.346	-70866.13
21	Demak.	-0.157	-129819.44
22	Semarang.	-0.024	113106.27
23	Temanggung	0.082	-104457.69
24	Kendal.	0.091	180331.35
25	Batang.	0.05	-22924.79
26	Pekalongan.	0.163	-16278.87
27	Pemalang.	0.33	-143738.86
28	Tegal.	0.092	-94757.55
29	Brebes	0.369	-262528.3
		3.181	-1010231.32

Sumber: PDRB Kabupaten dan PDRB Jawa Tengah Tahun 1996 dan 2001 (Diolah)

5.2.4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.

Keunggulan kompetitif dan spesialisasi sektor ini dijelaskan dalam Tabel 5.14.

Tabel 5.14.

**Hasil Analisis Shift- Share tentang Keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi
Untuk Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih**

No.	Kabupaten	Kompetitif	Spesialisasi
1	Cilacap	0.581	-27550.29
2	Banyumas.	0.224	560.31
3	Purbalingga	0.685	-2721.03
4	Banjarnegara	-0.027	-4356.43
5	Kebumen.	-0.388	-1123.86
6	Purworejo.	0.123	-596.03
7	Wonosobo.	0.114	582.46
8	Magelang.	0.342	-5010.39
9	Boyolali.	0.198	-2179.88
10	Klaten.	-0.057	-2177.95
11	Sukoharjo.	0.149	-93.91
12	Wonogiri.	0.39	-2152.48
13	Karanganyar	-0.295	7682.09
14	Sragen.	0.208	-166.66
15	Grobogan.	-0.559	-1938.51
16	Blora.	-0.132	-2510.56
17	Rembang.	-0.277	-1145.26
18	Pati.	0.36	2527.45
19	Kudus.	-0.026	-11901.25
20	Jepara.	0.78	-3625.2
21	Demak.	-0.033	-3074.2
22	Semarang.	-0.246	4540.07
23	Temanggung	0.217	-590.54
24	Kendal.	0.453	4087.39
25	Batang.	0.377	-3588.29
26	Pekalongan.	1.481	-4220.86
27	Pemalang.	0.329	-1109.47
28	Tegal.	0.24	-4052.01
29	Brebes	0.692	-2025.97
		5.903	-67931.26

Sumber: PDRB Kabupaten dan PDRB Jawa Tengah Tahun 1996 dan 2001 (Diolah)

Dari Tabel 5.14 menunjukkan bahwa kabupaten yang mempunyai keunggulan kompetitif sebanyak 19 kabupaten yaitu Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, kab. Pati, Kab. Jepara, Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Brebes. Bila dibandingkan dengan sektor basis , Kab. Karanganyar dan Kab. Semarang yang merupakan sektor basis tapi tidak mempunyai keunggulan kompetitif.

Untuk Spesialisasi sebanyak 4 Kabupaten yang mempunyai spesialisasi yaitu kab. Banyumas, Kab. Karanganyar, Kab. Wonosobo dan Kab. Kendal. Ke empat kabupaten tersebut merupakan kabupaten yang mempunyai sektor basis.

5.2.5. Sektor Bangunan

Menurut hasil analisis shift – share untuk sektor Bangunan yang mempunyai keunggulan kompetitif sebanyak 9 Kabupaten yaitu Kab. Cilacap, Kab. Purbalingga, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Karanganyar, Kab. Temanggung, Kab. Pekalongan. Bila dibandingkan dengan sektor basis ada 6 kabupaten yang merupakan sektor basis dan mempunyai keunggulan kompetitif yaitu Kab. Purbalingga, Kab. Magelang, Kab. Klaten, kab. Sukoharjo, kab. Temanggung dan Kab. Pekalongan.

Kabupaten yang mempunyai spesialisasi dalam sektor ini sebanyak 15 kabupaten yaitu Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo Kab. Magelang, Kab. Klaten, kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Temanggung, kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal.

Secara rinci hasil analisis shift- share tentang keunggulan kompetitif dan spesialisasi untuk sektor Bangunan dijelaskan pada Tabel 5.15.

Tabel 5.15.
Hasil Analisis Shift- Share tentang Keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi
Untuk Sektor Bangunan

No.	Kabupaten	Kompetitif	Spesialisasi
1	Cilacap	0.325	-193260.42
2	Banyumas.	-0.083	40.97
3	Purbalingga	0.089	2295.66
4	Banjarnegara	-0.005	19871.35
5	Kebumen.	-0.21	-18509.48
6	Purworejo.	-0.096	14994.16
7	Wonosobo.	-0.395	25155.3
8	Magelang.	0.262	4008.27
9	Boyolali.	0.294	-22382.69
10	Klaten.	0.207	40102.76
11	Sukoharjo.	0.179	-8428.22
12	Wonogiri.	-0.212	1038.08
13	Karanganyar	0.079	-26149.03
14	Sragen.	-0.246	11120.11
15	Grobogan.	-0.406	30970.49
16	Blora.	-0.341	11088.83
17	Rembang.	-0.125	-671.08
18	Pati.	-0.086	-8242.29
19	Kudus.	-0.131	-122594.37
20	Jepara.	0.173	-7953.91
21	Demak.	-0.067	-7838.83
22	Semarang.	-0.578	13699.57
23	Temanggung	0.203	15787.07
24	Kendal.	-0.251	-23769.76
25	Batang.	0.352	-8557.73
26	Pekalongan.	0.13	2190.73
27	Pemalang.	-0.161	3619.43
28	Tegal.	-0.052	3955.92
29	Brebes	-0.309	-3068.83
		-1.461	-251487.94

Sumber: PDRB Kabupaten dan PDRB Jawa Tengah Tahun 1996 dan 2001 (Diolah)

5.2.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Keunggulan kompetitif dan spesialisasi untuk sektor ini dijelaskan pada Tabel 5.16

Tabel 5.16.

Hasil Analisis Shift- Share tentang Keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi Untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

No.	Kabupaten	Kompetitif	Spesialisasi
1	Cilacap	0.088	675182.66
2	Banyumas.	0.002	-87825.65
3	Purbalingga	-0.117	-24896.11
4	Banjarnegara	-0.216	-70992.79
5	Kebumen.	-0.253	-49379.51
6	Purworejo.	-0.049	-26664.9
7	Wonosobo.	0.27	-53855.9
8	Magelang.	0.002	-78490.48
9	Boyolali.	-0.156	49516.88
10	Klaten.	-0.15	76259.29
11	Sukoharjo.	0.163	-28087.2
12	Wonogiri.	-0.271	-55652.76
13	Karanganyar	-0.004	-70747.62
14	Sragen.	-0.108	-48647.15
15	Grobogan.	-0.019	-29589.87
16	Blora.	-0.052	-34996.78
17	Rembang.	0.004	-26558.01
18	Pati.	-0.108	-52745.32
19	Kudus.	-0.175	187781.2
20	Jepara.	0.069	4431.85
21	Demak.	-0.077	-10988.1
22	Semarang.	-0.159	-50351.12
23	Temanggung	-0.203	-67004.29
24	Kendal.	-0.146	-49909.93
25	Batang.	-0.204	-20152.44
26	Pekalongan.	-0.02	-10538.74
27	Pemalang.	0.046	-888.63
28	Tegal.	0.089	1563.07
29	Brebes	0.175	-4944.82
		-1.579	40826.83

Sumber: PDRB Kabupaten dan PDRB Jawa Tengah Tahun 1996 dan 2001 (Diolah)

Untuk Sektor perdagangan, Hotel dan Restoran seperti yang terlihat pada Tabel 5.16 sebanyak 10 Kabupaten yang mempunyai keunggulan kompetitif yaitu kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purworejo, Kab. Magelang, Kab. Sukoharjo, Kab. Rembang, Kab. Jepara, Kab. Pekalongan, kab. Pemalang, Kab. Tegal dan Kab. Brebes. Bila dibandingkan dengan sektor basis hanya 3 kabupaten yang merupakan sektor basis dan mempunyai keunggulan kompetitif yaitu kab. Culacap, Kab. Sukoharjo dan kab. Tegal.

Kabupaten yang mempunyai spesialisasi untuk sektor ini sebanyak 5 kabupaten yaitu Kab. Cilacap, Kab. Boyolali, kab. Kudus, Kab. Jepara dan kab. Tegal. Bila dibandingkan dengan sektor basis maka hanya kab. Cilacap, Kab. Klaten, Kab. Kudus dan Kab. Tegal saja yang merupakan sektor basis dan mempunyai spesialisasi.

5.2.6 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Kabupaten yang mempunyai keunggulan kompetitif pada sektor ini sebanyak 10 Kabupaten yaitu Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Banjarnegara, Kab. Magelang, kab. Boyolali, Kab. Sragen, kab. Jepara, kab. Semarang, kab. Temanggung. Bila dibandingkan dengan sektor basis sebanyak 6 kabupaten yang merupakan sektor basis dan mempunyai keunggulan kompetitif yaitu kab. Banyumas, Kab. Banjarnegara, kab. Purworejo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Jepara dan Kab. Temanggung.

Kabupaten yang mempunyai spesialisasi sebanyak 10 kabupaten yaitu Kab. Banyumas, kab. Purbalingga, Kab. Wonosobo, kab. Magelang, Kab. Wonogiri, kab. Rembang, kab. Jepara, Kab. Temanggung, Kab. Pekalongan dan Kab. Tegal. Bila dibandingkan dengan sektor basis sebanyak 8 Kabupaten yang merupakan sektor basis

dan mempunyai spesialisasi. Secara rinci hasil analisis shift- share tentang keunggulan kompetitif dan spesialisasi pada sektor ini terlihat pada Tabel 5.17.

Tabel 5.17.

**Hasil Analisis Shift- Share tentang Keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi
Untuk Sektor Pengangkutan dan komunikasi**

No.	Kabupaten	Kompetitif	Spesialisasi
1	Cilacap	0.225	-159839.81
2	Banyumas.	0.02	34646.91
3	Purbalingga	-0.009	6149.75
4	Banjarnegara	0.116	-6066.49
5	Kebumen.	-0.099	-5128.86
6	Purworejo.	0.354	-785.11
7	Wonosobo.	-0.292	12214.71
8	Magelang.	0.063	14682.37
9	Boyolali.	0.246	-6549.2
10	Klaten.	-0.064	-12540.73
11	Sukoharjo.	-0.043	-14097.56
12	Wonogiri.	-0.109	32652.45
13	Karanganyar	-0.238	-17783.5
14	Sragen.	0.048	-3327.44
15	Grobogan.	-0.001	-9982.91
16	Blora.	-0.31	-2396.62
17	Rembang.	-0.34	17070.21
18	Pati.	-0.198	-2557.92
19	Kudus.	-0.173	-89928.14
20	Jepara.	0.114	23381.98
21	Demak.	-0.158	-2265.28
22	Semarang.	0.032	-23046.43
23	Temanggung	0.05	4141.03
24	Kendal.	-0.204	-29846.93
25	Batang.	-0.131	-13895.01
26	Pekalongan.	-0.16	1074.95
27	Pemalang.	-0.055	-6947.01
28	Tegal.	-0.521	17454.95
29	Brebes	-0.102	-29019.84
		-1.939	-272535.48

Sumber: PDRB Kabupaten dan PDRB Jawa Tengah Tahun 1996 dan 2001 (Diolah)

5.2.6. Sektor Keuangan, Sewa dan jasa Perusahaan

Keunggulan kompetitif dan spesialisasi untuk sektor ini dijelaskan pada Tabel 5.18

Tabel 5.18.

**Hasil Analisis Shift- Share tentang Keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi
Untuk Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan**

No.	Kabupaten	Kompetitif	Spesialisasi
1	Cilacap	0.193	-195069.5
2	Banyumas.	0.283	34590.87
3	Purbalingga	0.328	-7373.8
4	Banjarnegara	0.371	-5330.47
5	Kebumen.	0.517	-9904.32
6	Purworejo.	0.24	-972.8
7	Wonosobo.	0.004	221.96
8	Magelang.	0.196	-7330.81
9	Boyolali.	0.388	202.06
10	Klaten.	0.145	7001.92
11	Sukoharjo.	0.297	-7687.58
12	Wonogiri.	0.241	874.36
13	Karanganyar	0.172	-18089.72
14	Sragen.	0.123	43.96
15	Grobogan.	0.212	-8682.19
16	Blora.	0.263	16026.57
17	Rembang.	0.221	2073.53
18	Pati.	0.214	33636.74
19	Kudus.	0.559	-98688.82
20	Jepara.	0.299	2335.35
21	Demak.	0.32	-13264.55
22	Semarang.	0.21	-15622.14
23	Temanggung	0.218	1432.33
24	Kendal.	0.362	-40277.49
25	Batang.	0.11	-10108.85
26	Pekalongan.	0.265	2980.71
27	Pemalang.	0.271	6116.56
28	Tegal.	0.589	7723.11
29	Brebes	0.179	-2703.66
		7.79	-325846.67

Sumber: PDRB Kabupaten dan PDRB Jawa Tengah Tahun 1996 dan 2001 (Diolah)

Seperti dijelaskan pada Tabel 5.18. semua kabupaten mempunyai keunggulan kompetitif dari sektor ini tapi yang mempunyai spesialisasi hanya 13 kabupaten saja yaitu kabupaten Banyumas, kab. Wonosobo, Kab. Magelang, kab. Wonogiri, Kab. Sragen, kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Kudus, kab. Temanggung, kab. Pekalongan, kab. Pemalang, dan Kab. Tegal. Bila dibandingkan dengan sektor basis maka 13 kabupaten mempunyai spesialisasi juga merupakan sektor basis.

5.2.9. Sektor Jasa – Jasa

Keunggulan kompetitif dan spesialisasi untuk Jasa – Jasa dijelaskan pada Tabel 5.19 dimana sebanyak 24 kabupaten yang mempunyai keunggulan kompetitif . 5 Kabupaten yang tidak mempunyai keunggulan kompetitif adalah kab. Banyumas, kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, kab. Boyolali dan Kab. Kudus. Dari 5 kabupaten yang tidak mempunyai keunggulan kompetitif tersebut Kab. Banyumas dan Kab. Purworejo merupakan sektor basis tapi tidak mempunyai keunggulan kompetitif.

Untuk spesialisasi sebanyak 18 kabupaten yang mempunyai spesialisasi yaitu kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, kab. Banjarnegara, kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Magelang, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, kab. Grobogan, Kab. Blora, kab. Rembang, Kab. Demak, Kab. Temanggung, Kab. Batang, Kab. Pekalongan dan Kab. Tegal . Bila dilihat dari sektor basis hanya kab. Sragen, Kab. Semarang dan Kab. Pemalang yang merupakan sektor basis tapi tidak mempunyai spesialisasi untuk sektor ini.

Secara rinci hasil analisis shif- share tentang keunggulan kompetitif dan spesialisasi dijelaskan dalam tabel 5.19.

Tabel 5.19.
Hasil Analisis Shift- Share tentang Keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi
Untuk Sektor Jasa – Jasa

No	Kabupaten	Kompetitif	Spesialisasi
1	Cilacap	0.03	-387256.22
2	Banyumas.	-0.017	83311.37
3	Purbalingga	0.063	78693.14
4	Banjarnegara	0.419	21638.52
5	Kebumen.	0.042	69993.24
6	Purworejo.	-0.027	85786.28
7	Wonosobo.	-0.049	-17862.86
8	Magelang.	0.433	16278.7
9	Boyolali.	-0.023	-599.17
10	Klaten.	0.178	4994.75
11	Sukoharjo.	0.162	17983.77
12	Wonogiri.	0.34	24411.75
13	Karanganyar	0.089	30989.61
14	Sragen.	0.364	-4419.46
15	Grobogan.	0.068	34243.34
16	Blora.	0.055	14733.3
17	Rembang.	0.107	12762.73
18	Pati.	0.111	-12304.18
19	Kudus.	-0.009	-263291.88
20	Jepara.	0.203	-13638.83
21	Demak.	0.011	23032.93
22	Semarang.	0.381	-9338.59
23	Temanggung	0.169	60444.56
24	Kendal.	0.205	-35058.03
25	Batang.	0.101	14764.85
26	Pekalongan.	0.15	25827.91
27	Pemalang.	0.202	-7160.4
28	Tegal.	0.083	5429.7
29	Brebes	0.016	-40424.54
		3.857	-166033.71

Sumber: PDRB Kabupaten dan PDRB Jawa Tengah Tahun 1996 dan 2001 (Diolah)

Secara keseluruhan untuk Propinsi Jawa Tengah sektor – sektor yang mempunyai keunggulan komnpetitif seperti terlihat pada tabel 5.20.

Tabel 5.20

Kompilasi hasil analisis shift – share tentang keunggulan kompetitif per sektor
Di Jawa Tengah

No	Kabupaten	Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cilacap	v	v		v	v	v	v	v	v
2	Banyumas.				v		v	v	v	
3	Purbalingga.				v	v			v	v
4	Banjarnegara			v				v	v	v
5	Kebumen.								v	v
6	Purworejo.	v			v		v	v	v	
7	Wonosobo.				v				v	
8	Magelang.	v	v		v	v	v	v	v	v
9	Boyolali.			v		v		v	v	
10	Klaten.		v			v			v	v
11	Sukoharjo.			v	v		v		v	v
12	Wonogiri.	v		v	v				v	v
13	Karanganyar			v		v			v	v
14	Sragen.				v			v	v	v
15	Grobogan.	v							v	v
16	Blora.	v							v	v
17	Rembang.	v					v		v	v
18	Pati.	v		v	v				v	v
19	Kudus.			v					v	
20	Jepara.				v		v	v	v	v
21	Demak.	v		v					v	v
22	Semarang.			v				v	v	v
23	Temanggung				v	V		v	v	v
24	Kendal.				v				v	v
25	Batang.				v				v	v
26	Pekalongan.				v	V	v		v	v
27	Pemalang.	v	v		v		v		v	v
28	Tegal.	v			v		v		v	v
29	Brebes	v	v		v		v		v	v
	Jumlah	12	5	9	18	8	11	10	35	24

Sumber : Hasil analisis shift – share per kabupaten.

Pada Tabel 5.20 terlihat bahwa terdapat beberapa kabupaten yang mempunyai keunggulan kompetitif untuk masing- masing sektor. Seluruh kabupaten mempunyai keunggulan kompetitif untuk sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan . Namun hanya 5 kabupaten yang mempunyai keunggulan kompetitif untuk sektor pertambangan dan penggalan. Bila dibandingkan dengan Tabel 5.10 yaitu mengenai sektor Basis di seluruh Jawa Tengah, tidak semua sektor basis mempunyai keunggulan kompetitif demikian juga sebaliknya tidak semua sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif merupakan sektor basis.

Tabel 5.21 adalah kompilasi dari spesialisasi untuk tiap sektor di seluruh Jawa Tengah. Pada tabel tersebut terlihat bahwa untuk sektor pertanian hanya 3 kabupaten yang mempunyai spesialisasi dan 3 kabupaten tersebut bukan merupakan kabupaten yang mempunyai sektor basis pada sektor pertanian. Untuk sektor Industri, hanya 5 kabupaten yang mempunyai spesialisasi dan kabupaten tersebut seluruhnya merupakan kabupaten yang mempunyai sektor basis pada sektor ini. Sektor yang paling banyak mempunyai spesialisasi adalah sektor Jasa- Jasa yaitu sebanyak 17 kabupaten.

Secara rinci hasil kompilasi dari analisis shift- share tentang spesialisasi dapat dilihat pada Tabel 5.21.

Tabel 5.21

Kompilasi analisis Shift – share tentang spesialisasi per sektor di Jawa Tengah

No	Kabupaten	Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cilacap	v		v			v			
2	Banyumas.		v		v	v		v	v	v
3	Purbalingga.					v		v		v
4	Banjarnegara					v				v
5	Kebumen.		v							v
6	Purworejo.		v							v
7	Wonosobo.				v	v		v	v	
8	Magelang.		v			v		v	v	v
9	Boyolali.						v			
10	Klaten.					v				
11	Sukoharjo.		v							v
12	Wonogiri.		v					v	v	v
13	Karanganyar		v	v	v					v
14	Sragen.		v			v			v	
15	Grobogan.		v			v				v
16	Blora.					v			v	v
17	Rembang.		v					v	v	v
18	Pati.								v	
19	Kudus.	v		v			v		v	
20	Jepara.						v	v		
21	Demak.									v
22	Semarang.	v		v						
23	Temanggung		v			v		v	v	v
24	Kendal.			v	v					
25	Batang.		v							v
26	Pekalongan.					v		v	v	v
27	Pemalang.					v			v	
28	Tegal.		v			v	v	v	v	v
29	Brebes		v							
	Jumlah	3	14	5	4	13	5	10	13	17

Sumber : Hasil analisis shift – share per kabupaten

Disamping menentukan sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi, analisis shift share juga menghasilkan komponen perubahan pertumbuhan ekonomi, Komponen Perubahan bauran Industri, Komponen efek alokasi.

Komponen perubahan pertumbuhan ekonomi ini secara implisit mengemukakan bahwa setiap sektor di suatu wilayah kabupaten hendaknya tumbuh pada laju pertumbuhan tingkat propinsi hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi sektor – sektor di wilayah kabupaten dipengaruhi oleh kebijakan – kebijakan ekonomi pada tingkat propinsi. Komponen perubahan ekonomi terjadi karena pengaruh dari pertumbuhan tingkat propinsi (m) dengan kata lain apabila pertumbuhan pada tingkat kabupaten sama dengan pertumbuhan tingkat propinsi ($r_{ij} - m$) maka hasil dari komponen pertumbuhan inilah sebenarnya perubahan yang diharapkan oleh propinsi Jawa Tengah yang dibebankan kepada Kabupaten sebagai wujud keterkaitan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Secara lengkap hasil analisis shift – share tentang perubahan pertumbuhan ekonomi pada lampiran 3, yang menunjukkan bahwa perubahan pertumbuhan ekonomi di kabupaten – kabupaten di Jawa Tengah seluruhnya bertanda positif yang berarti seluruh kabupaten di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan lebih besar bila dibandingkan dengan pertumbuhan di Propinsi Jawa Tengah sendiri pada periode tahun 1996 - 2001. Perubahan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kab. Cilacap sebesar 37.632.57 juta rupiah dan Kab. Kudus sebesar 36.200.57 juta rupiah, dimana sektor industri yang paling besar mengalami perubahan pertumbuhan ekonomi. Untuk Kab. Cilacap perubahan pertumbuhan ekonomi sektor Industri sebesar 26.386.22 juta dan Kab. Kudus sebesar 22.413.86 juta . Sedang kabupaten yang perubahan pertumbuhan ekonomi paling kecil

adalah Kabupaten Rembang yaitu sebesar 5.281.86 juta rupiah dan Kab. Wonosobo sebesar 6.069.17 juta rupiah.

Komponen perubahan bauran industri adalah untuk mengukur sejauh mana laju pertumbuhan output sektoral suatu wilayah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan laju pertumbuhan output sektor yang sama pada tingkat di atasnya.

Untuk melihat komponen perubahan bauran industri dijelaskan pada Lampiran 4 yang menunjukkan bahwa Secara keseluruhan kabupaten yang mempunyai proporsi lebih dibanding dengan proporsi tingkat Jawa Tengah adalah Kab. Cilacap, Kab. Purbalingga, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Pemalang, Kab. Tegal dan Kab. Brebes. 15 kabupaten yang lainnya kurang daripada proporsi tingkat propinsi. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB dari 15 Kabupaten adalah kurang bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan di Jawa Tengah

Komponen perubahan keunggulan kompetitif ini untuk membantu dalam menentukan bagaimana sektor ekonomi suatu daerah kompetitif dalam perbandingannya dengan sektor yang sama ditingkat di atasnya. Secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 5 . Perubahan keunggulan kompetitif per sektor per kabupaten di Jawa Tengah mempunyai pengaruh ketidak unggulan kompetitif terutama pada sektor pertanian , pertambangan dan penggalian, Sektor Bangunan, Sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor Pengangkutan dan komunikasi. Hal ini ditunjukkan bahwa sektor – sektor tersebut mempunyai nilai yang negatif untuk komponen perubahan keunggulan kompetitif, menunjukkan bahwa share sektor ini per kabupaten pada umumnya mengalami pertumbuhan yang lebih lamban dibandingkan dengan pertumbuhan di Jawa Tengah.

Selain itu ada pula sektor sektor yang mempunyai pertumbuhan lebih cepat dari pertumbuhan di Jawa Tengah yaitu sektor Industri pengolahan, Listrik gas dan air bersih, Pengangkutan dan komunikasi, Keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan sektor Jasa- jasa. Kabupaten yang mempunyai perubahan keunggulan kompetitif positif untuk semua sektor yang berarti semua sektor mempunyai keunggulan kompetitif bila dibandingkan dengan Jawa Tengah adalah Kab. Cilacap.

Komponen perubahan efek lokasi . Komponen ini memperlihatkan pengaruh keunggulan kompetitif atau persaingan menurut analisis *shift- share* tradisional (Cij) dan pengaruh alokasi yang terdiri dari tingkat spesialisasi sektor dan keunggulan kompetitif. Pengaruh persaingan adalah bila suatu sektor tertentu diwilayah tertentu tumbuh lebih cepat dari sektor yang sama diwilayah diatasnya. Perbedaan antara variabel wilayah nyata dan variabel wilayah yang diharapkan adalah merupakan spesialisasi daerah. dan bila spesialisasi ini dikalikan dengan perbedaan laju pertumbuhan sektor diwilayah itu dengan laju pertumbuhan sektor diwilayah diatasnya atau keunggulan kompetitif maka akan menghasilkan efek perubahan alokasi di daerah yang bersangkutan.

Secara rinci komponen perubahan efek alokasi per sektor per kabupaten se Jawa Tengah dapat dilihat pada lampiran 6. Dari 29 Kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang mempunyai efek alokasi positif sebanyak 9 kabupaten yaitu Kab. Cilacap, Kab. Banjarnegara, Kab. Kab. Boyolali, Kab. Wonogiri, Kab. Pati, Kab. Demak, Kab. Temanggung, kab. Kendal dan Kab. Brebes.

5.3. Tipologi Daerah.

Untuk menentukan tipologi daerah pada penelitian ini menggunakan metode *Klassen Tipologi* yaitu dengan membagi kabupaten kabupaten di Jawa Tengah dengan 4 tipologi berdasarkan perbandingannya dengan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita antara rata-rata masing-masing Kabupaten dengan rata-rata Jawa Tengah. Tipologi 1 adalah Daerah Maju dan cepat tumbuh, dimana baik laju pertumbuhan maupun pendapatan perkapita kabupaten lebih tinggi dari Jawa Tengah, Tipologi 2 adalah daerah maju tapi tertekan bila laju pertumbuhan ekonomi kabupaten lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tapi pendapatan perkapitanya lebih tinggi, Daerah tipologi 3 adalah daerah berkembang cepat yaitu apabila daerah tersebut mempunyai pendapatan perkapita lebih tinggi dari pendapatan perkapita Jawa Tengah tapi laju pertumbuhan ekonominya lebih rendah sedang tipologi 4 adalah daerah relatif tertinggal yaitu bila daerah tersebut baik laju pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan perkapita lebih rendah dari Jawa Tengah.

Secara rinci penentuan tipologi daerah dapat dilihat pada Tabel 5.22.

Tabel 5.22.

**Klasifikasi Tipologi Daerah Perkabupaten Se Jawa Tengah
Menurut Klassen Tipologi**

No	Kabupaten	laju pertumbuhan ekonomi kabupaten	rata - rata pendapatan percapita Kabupaten	Tipologi Daerah
	Jawa Tengah	1.87	1,161,320.29	
1	Cilacap	3.61	1,305,403.23	1
2	Semarang.	1.92	1,351,481.60	1
3	Sukoharjo.	1.65	1,472,085.95	2
4	Karanganyar	1.49	1,527,979.59	2
5	Kudus.	0.21	4,714,510.67	2
6	Kendal.	1.41	1,808,715.63	2
7	Purworejo.	1.95	860,808.66	3
8	Magelang.	2.27	959,771.92	3
9	Wonogiri.	2.32	703,546.20	3
10	Jepara.	3.64	1,064,913.16	3
11	Temanggung	2.27	1,080,867.15	3
12	Pekalongan.	2.07	1,116,856.97	3
13	Pemalang.	3.11	858,312.45	3
14	Tegal.	2.47	570,230.46	3
15	Brebes	3.86	811,014.51	3
16	Banyumas.	1.19	699,911.93	4
17	Purbalingga	1.30	750,696.57	4
18	Banjarnegara	0.93	1,010,965.15	4
19	Kebumen.	0.41	761,896.95	4
20	Wonosobo.	0.54	737,559.99	4
21	Boyolali.	0.99	1,006,582.17	4
22	Klaten.	1.16	984,705.79	4
23	Sragen.	1.31	805,204.74	4
24	Grobogan.	(0.36)	563,853.82	4
25	Blora.	1.18	796,211.42	4
26	Rembang.	1.64	903,614.69	4
27	Pati.	0.85	816,748.63	4
28	Demak.	1.76	804,915.83	4
29	Batang.	1.06	1,132,466.86	4

Sumber : Data PDRb dab PDRB percapita kabupten tahun 2001

Dari Tabel 5.22 tipologi daerah perkabupaten di Jawa Tengah adalah sebagai berikut : Kab. Cilacap dan Kab. Semarang masuk dalam tipologi 1 yaitu daerah maju dan tumbuh cepat, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Kudus, Kab. Kendal masuk dalam tipologi 2 yaitu daerah maju tapi tertekan hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang menurun cukup tajam pada tahun 1998 , kab. Purworejo, Kab. Magelang, Kab. Wonogiri, Kab. Jepara, kab. Pekalongan, Kab. Pemasang, Kab. Tegal dan Kab. Brebes masuk dalam tipologi 3 yaitu daerah berkembang cepat yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi lebih cepat dari Jawa Tengah. Sedang 14 Daerah lainnya yaitu Kab.Banyumas, Kab.Purbalingga, Kab.Banjarnegara, Kab.Kebumen, Kab.Wonosobo, Kab.Boyolali, Kab.Klaten, Kab.Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab.Rembang, Kab. Pati, Kab. Demak, Kab.Batang. adalah daerah yang relatif tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa tahap pembangunan di tingkat kabupaten yang telah dicapai relatif rendah bila dibandingkan dengan tingkat Jawa Tengah.

5.5. Prioritas wilayah sektor basis untuk pengembangan pembangunan

Selain nilai LQ, keunggulan kompetitif dan tipologi daerah maka sesuai dengan kerangka teori yang ada pertumbuhan persektor juga diperlukan untuk penentuan prioritas wilayah untuk sektor basis. Dari hasil analisis LQ, Shift- Share, Tipologi daerah dan ditambah dengan pertumbuhan persektor kemudian dibuat skore nilai untuk masing-masing kategori maka dapat ditentukan kabupaten yang potensial untuk di kembangkan. Strategi yang dapat dikembangkan untuk pemilihan sektor basis masing- masing sektor adalah sebagai berikut :

5.5.1. Sektor Pertanian

Hasil penentuan sektor basis untuk sektor pertanian seperti terlihat pada Tabel 5.23

Tabel 5.23

Urutan prioritas untuk sektor pertanian dilihat dari analisis LQ, shift - share, tipologi daerah dan pertumbuhan sektoral

No	Kabupaten	nilai LQ		pertumbuhan sektoral		spesialisasi		keunggulan kompetitif		Tipologi	Jumlah skor	Prioritas sektor basis
		nilai	Skore	nilai	Skore	nilai	Skore	nilai	Skore			
1	Banyumas.	1.23	4	-5.37	4	82,273	4	-0.112	4	4	20	4
2	Purbalingga.	1.52	3	-0.31	3	88,522	4	-0.113	4	4	18	4
3	Banjarnegara	1.83	2	-7.67	4	184,033	3	-0.133	4	4	17	3
4	Kebumen.	1.94	2	-1.98	3	220,760	2	-0.149	4	4	15	2
5	Purworejo.	1.65	3	0.62	2	78,895	4	0.081	4	3	16	3
6	Wonosobo.	2.36	1	-4.08	3	191,029	3	-0.190	4	4	15	2
7	Magelang.	1.50	3	0.74	2	179,040	3	-0.146	4	3	15	2
8	Boyolali.	1.53	3	-3.05	3	82,155	4	0.049	3	4	17	3
9	Sukoharjo.	1.02	4	1.16	2	58,483	4	-0.200	4	2	16	3
10	Wonogiri.	2.36	1	-2.53	3	194,315	3	0.097	4	3	14	2
11	Sragen.	1.88	2	-2.23	3	152,641	3	-0.096	4	4	16	3
12	Grobogan.	2.26	1	5.02	1	213,563	2	-0.101	4	4	12	1
13	Blora.	2.24	1	2.19	1	152,776	3	0.100	2	4	11	1
14	Rembang.	2.30	1	5.04	1	114,215	4	0.123	2	4	12	1
15	Pati.	2.18	2	2.26	1	186,181	2	0.140	2	4	11	1
16	Jepara.	1.10	4	4.41	1	71,626	4	-0.106	4	3	16	3
17	Demak.	2.16	2	2.54	1	151,769	3	0.099	4	4	14	2
18	Temanggung	1.63	3	6.84	1	89,789	4	0.044	3	3	14	2
19	Batang.	1.29	4	-1.33	3	56,849	4	-0.085	4	4	19	4
20	Pemalang.	1.62	3	0.33	2	153,719	3	0.026	2	3	13	2
21	Tegal.	1.30	4	0.99	2	58,436	4	0.050	2	3	15	2
22	Brebes	2.58	1	4.06	4	343,880	1	0.294	1	3	10	1

Sumber : PDRB tiap kabupaten & PDRB Jawa Tengah 1996 – 2001 (diolah)

Pada Tabel 5.23 Dari 22 kabupaten yang mempunyai LQ > 1 untuk sektor pertanian Prioritas I Kabupaten yang dapat dikembangkan adalah kab. Grobogan, kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Brebes. Untuk prioritas ke II Kab. Kebumen, Kab. Wonosobo, kab. Magelang, kab. Wonogiri, Kab. Demak, Kab. Temanggung, Kab. Pemalang, Kab. Tegal. Untuk prioritas ke tiga kab. Banjarnegara, Kab. Purworejo, Kab. Boyolali, Kab.

Sukoharjo, Kab. Sragen dan Kab. Jepara. Sedang untuk prioritas ke empat adalah kab. Banyumnas, Kab, Purbalingga, dan Kab. Temanggung.

5.5.2. Sektor Pertambangan dan penggalian

Untuk sektor pertambangan dan penggalian seperti pada Tabel 5.24

Tabel 5.24

Urutan prioritas untuk sektor pertambangan dan penggalian dilihat dari analisis LQ, shift share, tipologi daerah dan pertumbuhan sektoral

No.	Kabupaten	nilai LQ		Pertumbuhan sektoral		spesialisasi		keunggulan kompetitif		Tipologi	Jumlah skor	Prioritas
		Nilai	Skore	nilai	Skore	Nilai	Skore	nilai	Skore			
1	Banyumas.	1.08	4	5	2	1,246.33	4	-0.008	1	4	15	3
2	Kebumen.	3.31	1	5.48	1	32,659.80	1	-0.191	2	4	9	1
3	Purworejo.	2.09	2	0.69	2	11,505.63	3	-0.1	2	3	12	2
4	Magelang.	1.58	4	3.84	2	8,043.11	4	0.042	1	3	14	3
5	Sragen.	1.48	4	-1.24	3	8,317.85	4	-0.292	2	4	17	4
6	Blora.	2.85	1	-13.17	4	27,573.62	1	-0.357	3	4	13	2
7	Rembang.	1.1	4	7.23	1	11,922.72	3	-0.735	4	4	16	4
8	Batang.	1.75	3	1.12	2	7,612.94	4	-0.065	4	4	17	4
9	Tegal.	1.26	4	11.13	1	4,246.46	4	-0.032	1	3	13	2

Sumber : PDRB tiap kabupaten & PDRB Jawa Tengah 1996 – 2001 (diolah)

Pada Tabel 5.24 terlihat dari 9 kabupaten yang mempunyai nilai LQ > 1 untuk sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi prioritas pertama adalah Kab. Kebumen. Untuk prioritas ke dua adalah kab. Blora, kab. Purworejo dan Kab. Tegal. Sedang untuk prioritas ketiga adalah Kab. Banyumas dan kab. Magelang dan untuk prioritas ke empat adalah kab. Sragen, kab. Rembang dan Kab. Batang.

5.5.3. Sektor Industri

pengolahan dari 6 kabupaten yang mempunyai $LQ > 1$ ada tiga kabupaten yang mempunyai keunggulan kompetitif seperti terlihat pada Tabel 5.25.

Tabel 5.25

Urutan prioritas untuk sektor Industri Pengolahan dilihat dari analisis LQ, shift - share, tipologi daerah dan pertumbuhan sektoral

No.	Kabupaten	nilai LQ		pertumbuhan sektoral		spesialisasi		keunggulan kompetitif		Tipologi	Jumlah skor	prioritas sektor basis
		nilai	Skore	nilai	Skore	nilai	Skore	nilai	Skore			
1	Cilacap	1.61	2	4.43	1	759592	3	0.379	1	1	8	1
2	Karanganyar	1.23	4	-1.54	4	106911	4	-0.042	4	2	18	4
3	Kudus.	1.98	1	2.62	2	1029015	1	-0.057	4	2	10	1
4	Semarang.	1.38	4	4.39	1	113106	4	-0.024	4	1	14	3
5	Kendal.	1.48	3	4.53	1	180331	4	0.091	3	2	13	2
6	Pekalongan.	1.06	4	5.03	1	-16279	4	0.163	2	3	14	3

Sumber : PDRB tiap kabupaten & PDRB Jawa Tengah 1996 – 2001 (diolah)

Pada Tabel 5.25 terlihat bahwa dari 6 kabupaten yang mempunyai nilai $LQ > 1$ untuk sektor Industri yang menjadi prioritas Utama adalah Kab. Cilacap dan kab. Kudus, Prioritas kedua adalah Kab. Kendal, Prioritas ketiga adalah Kab. Semarang dan Kab. Pekalongan dan Prioritas ke empat adalah Kab. Karanganyar.

5.5.4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Pengolahan dari potensi ekonomi untuk sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dijelaskan pada Tabel 5.26 yang menerangkan kabupaten yang menjadi prioritas pertama adalah Kabupaten Pati dan kab. Kendal, Prioritas kedua adalah kab. Wonosobo, Kab. Sukoharjo, kab. Karanganyar dan Kab. Semarang. Prioritas ketiga adalah kab. Sragen dan Prioritas keempat adalah kab. Banyumas.

Tabel 5.26

Urutan prioritas untuk sektor Listrik gas dan air bersih dilihat dari analisis LQ, shift share , tipologi daerah dan pertumbuhan sektoral

No.	Kabupaten	nilai LQ		pertumbuhan sektoral		spesialisasi		keunggulan kompetitif		Tipologi	Jumlah skor	prioritas sektor basis
		nilai	Skore	nilai	Skore	Nilai	Skore	nilai	Skore			
1	Banyumas.	1.22	4	3.24	4	560.31	2	0.224	2	4	16	4
2	Wonosobo.	1.33	3	11.54	2	582.46	1	0.114	2	4	12	2
3	Sukoharjo.	1.11	4	18.22	1	-93.91	4	0.149	2	2	13	2
4	Karanganyar	1.43	2	5.99	4	7682.09	1	-0.295	4	2	13	2
5	Sragen.	1.12	4	14.71	1	-166.66	4	0.208	2	4	15	3
6	Pati.	1.59	1	13.08	2	2527.45	3	0.36	1	4	11	1
7	Semarang.	1.32	3	8.61	3	4540.07	2	-0.246	4	1	13	2
8	Kendal.	1.71	1	5.12	4	4087.39	2	0.453	1	2	10	1

Sumber : PDRB tiap kabupaten & PDRB Jawa Tengah 1996 – 2001 (diolah)

5.5.5. Sektor Bangunan

Pengolahan dari potensi ekonomi untuk sektor Bangunan , sebanyak 11 kabupaten yang mempunyai nilai LQ > 1 setelah digabungkan dengan pertumbuhan ekonomi, keunggulan kompetitif, spesialisasi dan tipologi daerah , untuk prioritas pertama adalah Kabupaten Purbalingga, kab. Wonosobo dan kab. Pekalongan, Untuk prioritas kedua adalah Kab.banjarnegara, Kab. Purworejo, Kab. Grobogan dan Kab. Batang. Untuk prioritas ketiga adalah kab. Magelang dan Kab. Sukoharjo Sedangkan untuk prioritas keempat adalah Kab.Klaten dan Kab. Temanggung seperti dijelaskan pada Tabel 5.27

Tabel 5.27

**Urutan prioritas untuk sektor Bangunan dilihat dari analisis LQ,
shift - share , tipologi daerah perumbuhan sektoral**

No.	Kabupaten	nilai LQ		pertumbuhan sektoral		spesialisasi		keunggulan kompetitif		Tipologi	Jumlah skor	Prioritas sektor basis
		nilai	Skore	nilai	Skore	nilai	Skore	nilai	Skore			
1	Purbalingga.	1.2	4	5.84	2	2295.66	4	0.089	2.0	4	16	1
2	Banjarnegara	1.51	3	8.2	1	19871.4	2	-0.005	3.0	4	13	2
3	Purworejo.	1.26	4	8.13	1	14994.2	3	-0.096	2.0	3	13	2
4	Wonosobo.	1.11	4	-0.84	4	25155.3	2	-0.395	4.0	4	18	1
5	Magelang.	1.34	3	9.82	1	4008.27	3	0.262	1.0	3	11	3
6	Klaten.	2.11	1	9.42	1	40102.8	1	0.207	1.0	4	8	4
7	Sukoharjo.	1.05	4	10.09	1	-8428.22	4	0.179	1.0	2	12	3
8	Grobogan.	1.01	4	5.3	2	30970.5	1	-0.406	4.0	4	15	2
9	Temanggung	1.74	2	5.8	2	15787.1	2	0.203	1.0	3	10	4
10	Batang.	1.11	4	7.06	2	-8557.73	4	0.352	1.0	4	15	2
11	Pekalongan.	1.17	4	-0.74	4	2190.73	4	0.13	2.0	3	17	1

Sumber : PDRB tiap kabupaten & PDRB Jawa Tengah 1996 – 2001 (diolah)

5.5.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor pengangkutan dan komunikasi terdapat 6 kabupaten yang mempunyai nilai $LQ > 1$. Setelah digabungkan dengan pertumbuhan ekonomi, keunggulan kompetitif, spesialisasi dan tipologi daerah, sebagai prioritas yang pertama dari sektor ini adalah Kab. Cilacap. Prioritas kedua Kab. Sukoharjo. Prioritas ketiga Kab Tegal dan prioritas keempat adalah Kab. Boyolali, Kab. Klaten dan Kab. Kudus seperti terlihat pada Tabel 5.28.

Tabel 5.28

Urutan prioritas untuk sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dilihat dari analisis LQ, Shift - share , tipologi daerah dan pertumbuhan sektoral

No.	Kabupaten	nilai LQ		pertumbuhan sektoral		spesialisasi		keunggulan kompetitif		Tipologi	Jumlah skor	Prioritas sektor basis
		nilai	Skore	nilai	Skore	Nilai	Skore	nilai	Skore			
1	Cilacap	1.37	1	5.2	1	675183	1	0.088	1	1	5	1
2	Boyolali.	1.09	4	3.17	3	49516.9	4	-0.156	4	4	19	4
3	Klaten.	1.13	3	4.88	1	76259.3	4	-0.15	4	4	16	4
4	Sukoharjo.	1.03	4	5.7	1	-28087.2	4	0.163	1	2	12	2
5	Kudus.	1.15	3	2.35	4	187781	3	-0.175	4	2	16	4
6	Tegal.	1.02	4	5.32	1	1563.07	4	0.089	1	3	13	3

Sumber : PDRB tiap kabupaten & PDRB Jawa Tengah 1996 – 2001 (diolah)

5.5.7.Sektor Pengangkutan dan komunikasi

Pengolahan potensi ekonomi untuk sektor ini dijelaskan pada Tabel 5.29

Tabel 5.29

Urutan prioritas untuk sektor Pengangkutan dan komunikasi dilihat dari analisis LQ, Shift - share , tipologi daerah dan pertumbuhan sektoral

No.	Kabupaten	nilai LQ		pertumbuhan sektoral		spesialisasi		keunggulan kompetitif		Tipologi	Jumlah skor	prioritas sektor basis
		nilai	Skore	nilai	Skore	nilai	Skore	nilai	Skore			
1	Banyumas	1.84	1	3.64	4	34646.9	1	0.020	2	4	12	2
2	Purbalingga.	1.24	3	4.07	4	6149.8	3	-0.009	3	4	17	4
3	Purworejo.	1.24	3	11.60	1	-785.1	4	0.354	1	3	12	2
4	Wonosobo.	1.3	3	8.13	2	12214.7	3	-0.292	4	4	16	4
5	Magelang.	1.34	3	4.88	3	14682.4	2	0.063	2	3	13	2
6	Boyolali.	1.01	4	6.10	3	-6549.2	4	0.246	1	4	16	4
7	Wonogiri.	1.8	1	11.45	1	32652.5	1	-0.109	3	3	9	1
8	Rembang.	1.31	3	1.66	4	17070.2	2	-0.340	4	4	17	4
9	Jepara.	1.68	1	2.26	4	23382.0	2	0.114	2	3	12	2
10	Temanggung	1.13	4	5.32	3	4141.0	3	0.050	2	3	15	3

Sumber : PDRB tiap kabupaten & PDRB Jawa Tengah 1996 – 2001 (diolah)

Tabel 2.28 menunjukkan bahwa sebagai prioritas pertama untuk sektor pengangkutan dan komunikasi adalah Kab. Wonogiri. Prioritas kedua kab.Banyumas, Kab. Purworejo, Kab. Magelang dan Kab. Jepara. Prioritas ketiga adalah kab. Temanggung dan prioritas keempat adalah Kab.Purbalingga, Kab. Wonosobo , Kab. Boyolali dan Kab. Rembang.

5.5.8. Sektor Keuangan, sewa dan jasa perusahaan

Untuk Sektor keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan dijelaskan dalam Tabel 5.230.

Dari Tabel 5.30

Urutas prioritas data untuk sektor Keuangan Sewa dan Jasa perusahaan dilihat dari analisis LQ, shift - share , tipologi daerah dan pertumbuhan sektoral

No.	Kabupaten	nilai LQ		pertumbuhan sektoral		spesialisasi		keunggulan kompetitif		Tipologi	Jumlah skor	prioritas sektor basis
		nilai	Skore	nilai	Skore	nilai	Skore	nilai	Skore			
1	Banyumas.	2.27	1	4.74	3	34590.9	1	0.283	3	4	12	1
2	Purbalingga.	1.1	4	2.54	4	-7373.8	4	0.328	2	4	18	4
3	Banjarnegara	1.34	3	13.09	1	-5330.5	4	0.371	2	4	14	2
4	Kebumen.	1.43	3	2.69	4	-9904.3	4	0.517	1	4	16	3
5	Purworejo.	1.24	4	5.85	3	-972.8	3	0.240	3	3	16	3
6	Wonosobo.	1.11	4	7.89	2	222.0	3	0.004	4	4	17	4
7	Magelang.	1.02	4	2.07	4	-7330.8	4	0.196	3	3	18	4
8	Boyolali.	1.55	3	12.01	1	202.1	3	0.388	2	4	13	1
9	Klaten.	1.35	3	3.93	4	7001.9	3	0.145	4	4	18	4
10	Sukoharjo.	1.22	4	6.38	3	-7687.6	4	0.297	2	2	15	2
11	Wonogiri.	1.28	4	3.62	4	874.4	3	0.241	3	3	17	4
12	Sragen.	1.18	4	5.85	3	44.0	3	0.123	4	4	18	4
13	Grobogan.	1.08	4	6.51	3	-8682.2	4	0.212	3	4	18	4
14	Blora.	1.91	2	5.15	3	16026.6	2	0.263	3	4	14	2
15	Rembang.	1.34	3	1.45	4	2073.5	3	0.221	3	4	17	4
16	Pati.	2.11	1	3.10	4	33636.7	1	0.214	3	4	13	1
17	Jepara.	1.29	4	5.84	3	2335.4	3	0.299	2	3	15	2
18	Semarang.	1.01	4	3.68	4	-15622.1	4	0.210	3	1	16	3
19	Temanggung	1.27	4	3.57	4	1432.3	3	0.218	3	3	17	4
20	Pekalongan.	1.36	3	4.65	3	2980.7	3	0.265	3	3	15	2
21	Pemalang.	1.37	3	4.66	3	6116.6	3	0.271	3	3	15	2
22	Tegal.	1.94	2	4.03	4	7723.1	3	0.589	1	3	13	1

Sumber : PDRB tiap kabupaten & PDRB Jawa Tengah 1996 – 2001 (diolah)

Tabel 2.30 menunjukkan bahwa untuk sektor keuangan, Sewa dan Jasa perusahaan dapat diprioritaskan pada kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Pati dan Kab. Tegal. Untuk prioritas kedua adalah Kab. Banjarnegara, Kab. Sukoharjo, Kab. Blora Kab. Jepara, Kab. Pekalongan dan Kab. Pemalang. Untuk prioritas ketiga Kab. Kebumen, Kab. Purworejo dan kab. Semarang Sedang untuk prioritas keempat adalah kab. Purbalingga, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Klaten, Kab. Wonogiri, kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Rembang dan Kab. Temanggung.

5.5.9. Sektor Jasa- Jasa

Sebanyak 21 Kabupaten yang mempunyai nilai $LQ > 1$ untuk sektor Jasa – Jasa setelah di padukan dengan pertumbuhan ekonomi, keunggulan kompetitif, spesialisasi dan Tipologi Daerah maka sektor ini dapat diprioritaskan pada Kab. Magelang, kab. Wonogiri dan Kab. Semarang . Untuk prioritas kedua adalah kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, kab. Banjarnegara, kab. Purworejo, kab. Kebumen dan Kab. Temanggung. Untuk prioritas ketiga dapat dilaksanakan pada Kab. Sukoharjo, kab. Karanganyar dan kab. Pekalongan. Sedangkan untuk prioritas keempat dapat dilaksanakan di kab. Klaten, kab. Sragen, kab. Grobogan, kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Demak, kab. Batang, kab. Pemalang dan kab. Tegal.

Secara rinci pengolahan untuk sektor Jasa – jasa dijelaskan pada Tabel 5.31 dibawah ini.

Tabel 5.31

**Urutan Prioritas untuk sektor Jasa – Jasa dilihat dari analisis LQ,
Shift - share , tipologi daerah dan pertumbuhan sektoral**

No.	Kabupaten	nilai LQ		pertumbuhan sektoral		spesialisasi		keunggulan kompetitif		Tipologi	Jumlah skor	Prioritas sektor basis
		nilai	Skore	nilai	Skore	Nilai	Skore	nilai	Skore			
1	Banyumas.	1.74	2	3.91	3	83311.4	1	-0.017	4	4	14	2
2	Purbalingga.	2.38	1	2.71	4	78693.1	1	0.063	4	4	14	2
3	Banjarnegara	1.64	3	5.39	3	21638.5	3	0.419	1	4	14	2
4	Kebumen.	1.90	2	7.73	2	69993.2	1	0.042	4	4	13	2
5	Purworejo.	2.10	1	3.41	4	85786.3	1	-0.027	4	3	13	2
6	Magelang.	1.58	3	8.22	2	16278.7	3	0.433	1	3	12	1
7	Klaten.	1.26	4	1.91	4	4994.8	4	0.178	3	4	19	4
8	Sukoharjo.	1.37	3	2.70	4	17983.8	3	0.162	3	2	15	3
9	Wonogiri.	1.70	2	12.99	1	24411.8	3	0.340	1	3	10	1
10	Karanganyar	1.38	3	0.35	4	30989.6	3	0.089	3	2	15	3
11	Sragen.	1.32	4	12.61	1	-4419.5	4	0.364	1	4	14	4
12	Grobogan.	1.64	3	2.45	4	34243.3	3	0.068	4	4	18	4
13	Blora.	1.25	4	1.89	4	14733.3	3	0.055	4	4	19	4
14	Rembang.	1.34	4	1.11	4	12762.7	4	0.107	3	4	19	4
15	Demak.	1.30	4	3.32	4	23032.9	3	0.011	4	4	19	4
16	Semarang.	1.39	3	7.70	2	-9338.6	4	0.381	1	1	11	1
17	Temanggung	2.08	1	1.06	4	60444.6	2	0.169	3	3	13	2
18	Batang.	1.35	4	8.48	2	14764.9	4	0.101	3	4	17	4
19	Pekalongan.	1.44	3	5.52	3	25827.9	3	0.150	3	3	15	3
20	Pemalang.	1.02	4	3.72	3	-7160.4	4	0.202	3	3	17	4
21	Tegal.	1.08	4	2.27	4	5429.7	2	0.083	4	3	17	4

Sumber : PDRB tiap kabupaten & PDRB Jawa Tengah 1996 – 2001 (diolah)

Secara keseluruhan diseluruh Jawa Tengah dapat ditentukan prioritas untuk pengembangan sektor basis seperti pada Tabel 5.32

Tabel 5.32

Prioritas pemilihan sektor basis di Jawa Tengah

No	Kabupaten	Sektor/ prioritas ke								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cilacap			1			1			
2	Banyumas.	4	2		4			2	1	2
3	Purbalingga.	4				1		4	2	2
4	Banjarnegara	3				2			2	2
5	Kebumen.	2	1						3	2
6	Purworejo.	3	2			2		2	3	2
7	Wonosobo.	2			2	1		4	4	
8	Magelang.	2	3			3		2	4	1
9	Boyolali.	3					4	4	1	
10	Klaten.					4	4		2	4
11	Sukoharjo.	3			2	3	2		4	3
12	Wonogiri.	2						1	4	1
13	Karanganyar			4	2					3
14	Sragen.	3	4		3				4	4
15	Grobogan.	1				2			4	4
16	Blora.	1	2						2	4
17	Rembang.	1	4					4	4	4
18	Pati.	1			1				1	
19	Kudus.			1			4			
20	Jepara.	3						2	2	
21	Demak.	2								4
22	Semarang.			3	2				3	1
23	Temanggung	2				4		3	4	2
24	Kendal.			2						
25	Batang.	4	4			3				4
26	Pekalongan.			3		1			2	3
27	Pemalang.	3							2	4
28	Tegal.	2	2				3		1	4
29	Brebes	1								

Sumber : Hasil analisis LQ, pertumbuhan persektor, Keunggulan kompetitif, spesialisasi (diolah)

Dari Tabel 5.32 dapat dijelaskan bahwa prioritas wilayah sektor basis untuk pengembangan wilayah di Jawa Tengah tidak bisa dibuat sama untuk tiap kabupaten. Dengan melihat kemampuan masing- masing kabupaten , ada beberapa kabupaten yang mempunyai prioritas pertama lebih dari satu seperti Kab. Cilacap (2 prioritas pertama), Kab. Wonogiri (2 prioritas pertama) dan kab. Pati (3 prioritas pertama). Namun adapula kabupaten yang tidak mempunyai prioritas pertama antara lain kab. Banjarnegara, Kab. Purworejo, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Demak, Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kab. Batang dan Kab. Pemalang walupun kabupaten tersebut mempunyai sektor basis lebih dari 1.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan.

Dari hasil analisis pada bab- bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis LQ untuk menentukan Sektor basis yang meliputi 9 Sektor di 29 kabupaten menunjukkan sektor pertanian sebagai sektor basis berdasarkan analisis LQ sebanyak 22 kabupaten, sektor pertambangan dan penggalian 9 kabupaten, sektor industri pengolahan 6 kabupaten , sektor listrik Gas dan air bersih 8 Kabupaten, sektor Bangunan 11 kabupaten, sektor perdagangan, hotel dan restoran 6 kabupaten, sektor komunikasi 10 kabupaten, sektor keuangan, jasa perusahaan 22 kabupaten ,sektor Jasa sebanyak 21 kabupaten. Kabupaten yang mempunyai sektor basis paling banyak yaitu mempunyai sektor basis sebanyak 6 sektor adalah kabupaten banyumas, Kab. Purworejo, Kab. Magelang dan Kab. Sukoharjo. Sedang Kabupaten yang mempunyai sektor basis paling sedikit adalah Kab. Brebes yang mempunyai sektor basis hanya 1 sektor.
2. Dari hasil analisis shift – share untuk menganalisis keunggulan kompetitif dan spesialisasi untuk masing- masing sektor per kabuparten adalah sebagai berikut :
 - Sektor pertanian : Yang mempunyai keunggulan kompetitif sebanyak 12 Kabupaten, spesialisasi sebanyak 26 kabupaten.
 - Sektor pertambangan dan penggalian : Keunggulan kompetitif sebanyak 5 Kabupaten dan spesialisasi sebanyak 13 Kabupaten.

- Sektor Industri : Yang mempunyai keunggulan kompetitif sebanyak 20 Kabupaten dan spesialisasi sebanyak 5 Kabupaten.
- Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih : Yang mempunyai keunggulan kompetitif sebanyak 19 Kabupaten dan spesialisasi sebanyak 4 Kabupaten.
- Sektor Bangunan : Yang mempunyai keunggulan kompetitif sebanyak 9 Kabupaten dan spesialisasi sebanyak 15 Kabupaten.
- Sektor Perdagangan , Hotel dan restoran : Yang mempunyai keunggulan kompetitif sebanyak 10 Kabupaten dan spesialisasi sebanyak 5 Kabupaten.
- Sektor Pengangkutan dan komunikasi : Yang mempunyai keunggulan kompetitif sebanyak 10 Kabupaten dan spesialisasi sebanyak 10 Kabupaten.
- Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa perusahaan, yang mempunyai keunggulan kompetitif sebanyak 35 Kabupaten dan spesialisasi sebanyak 13 Kabupaten.
- Sektor Jasa – Jasa : Yang mempunyai keunggulan kompetitif sebanyak 24 Kabupaten dan spesialisasi sebanyak 18 Kabupaten.

Dibandingkan dengan sektor basis . tidak semua sektor basis mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi demikian juga sebaliknya sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi belum tentu sebagai sektor basis.

3. Dari 29 Kabupaten di Jawa Tengah hanya 2 Kabupaten yang masuk dalam tipologi daerah maju dan cepat tumbuh (Tipologi I) yaitu Kab. Cilacap dan Kab. Semarang. 4 Kabupaten yang masuk dalam tipologi daerah maju tapi tertekan (Tipologi II) yaitu Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Kudus dan Kab. Kendal. 9 kabupaten yang termasuk dalam kategori cepat berkembang (Tipologi III)

yaitu Kab. Purworejo, Kab. Magelang, Kab. Wonogiri, Kab. Jepara, Kab. Temanggung. Kab. Pekalongan. Kab. Pemalang, kab. Tegal dan Kab. Brebes. Sisanya sebanyak 14 kabupaten termasuk daerah yang relatif tertinggal (tipologi IV).

4. Dari hasil analisis LQ, Shift- Share , tipologi daerah dan pertumbuhan sektoral dapat ditentukan kabupaten – kabupaten yang menjadi prioritas untuk pengembangan masing- masing sektor. Prioritas pertama untuk sektor pertanian adalah Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati dan kab. Brebes. Untuk sektor pertambangan dan penggalian Kab. Kebumen, Sektor Industri Kab. Cilacap dan Kudus, Sektor Listrik, gas dan Air Bersih Kab. Pati dan Kab. Kendal. Sektor Bangunan di Kab. Wonosobo , Kab. Purbalingga dan Kab. Pekalongan. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Kab. Cilacap. Sektor Pengangkutan dan komunikasi di Kab. Wonogiri. Sektor Keuangan, Sewa dan jasa perusahaan di kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Pati dan Kab. Tegal dan untuk sektor Jasa diprioritaskan pada kab. Magelang, kab. Wonogiri dan kab. Semarang.

4.2. Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan – keterbatasan antara lain :

1. Penelitian ini merupakan penelitian secara makro untuk tiap kabupaten di seluruh Jawa Tengah, sehingga untuk penentuan sektor basis lebih lanjut untuk tiap kabupaten perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam lagi karena selain faktor – faktor yang diteliti masih banyak lagi faktor yang mempengaruhinya.
2. Penelitian ini menggunakan jangka waktu penelitian selama enam tahun yakni mulai tahun 1996 sampai 2001 dengan maksud untuk melihat perubahan pertumbuhan ekonomi dari tahun sebelum krisis sampai kini yang nantinya untuk menentukan langkah – langkah selanjutnya berdasarkan perubahan kondisi perekonomian yang didapat. Tapi karena jumlah penggunaan tahun yang sedikit sehingga perubahan pertumbuhan ekonomi tidak terlihat.

4.3. Saran.

1. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mempunyai implikasi terhadap pemerintah Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan PDRB . Untuk pemerintah Jawa Tengah adalah memberi masukan mengenai distribusi alokasi anggaran pembangunan berupa bantuan pembangunan yang diberikan kepada Kabupaten atau fasilitasi untuk kemajuan program. Bagi pemerintah Kabupaten memberi masukan mengenai sektor – sektor yang dapat diprioritaskan untuk memacu perkembangan pembangunan di masing- masing daerahnya.
2. Untuk mengembangkan pembangunan daerah di Propinsi Jawa Tengah khususnya yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten yang diantaranya berupa bantuan pembangunan maupun fasilitasi dari pemerintah propinsi Jawa Tengah ke Pemerintah Kabupaten perlu mempertimbangkan sektor – sektor yang dapat di kembangkan di kabupaten yang bersangkutan sesuai dengan prioritas, sehingga pengembangan pembangunan dapat mencapai sasaran dan dapat meningkatkan PDRB. Disamping sektor prioritas hal – hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di masing- masing kabupaten.
3. Untuk pengembangan pembangunan di tingkat kabupaten diharapkan lebih menitik beratkan pada sektor – sektor yang potensial dan dapat diunggulkan agar dapat meningkatkan PDRB, namun penentuan alokasi kegiatan diwilayah kabupaten perlu di perhatikan agar sesuai dengan kondisi yang ada.
4. Selain penelitian dari potensi yang ada yaitu dengan melihat PDRB yang dihasilkan di masing- masing kabupaten dan Jawa Tengah untuk menentukan

sektor basis atau sektor – sektor yang potensial untuk dikembangkan pada masing- masing kabupaten namun perlu dilaksanakan juga penelitian dari sumber daya yang lain seperti sumberdaya alam, tenaga kerja, modal, investasi swasta dan hal lain yang dapat digunakan untuk memacu pengembangan pembangunan.

5. Sehubungan dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jangka waktu yang lebih panjang sehingga perubahan struktur ekonomi bisa lebih terlihat dan penelitian tiap kabupaten lebih mendalam lagi dengan memperhatikan faktor- faktor yang lain untuk menentukan sektor basis ditiap kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Propinsi Jawa Tengah, 1996 – 2001 , Jawa Tengah dalam angka
- BPS Propinsi Jawa Tengah 1996 – 2001, Pendapatan Daerah Regional Bruto
- BPS Propinsi Jawa Tengah 2001, Laju pertumbuhan PDRB
- BPS Propinsi Jawa Tengah 2001, Pendapatan percapita
- BPS Propinsi Jawa Tengah 1996 – 2001, Pendapatan Daerah Regional Bruto ,
29 kabupaten.
- BPS Kabupaten Brebes 2001, Pendapatan Daerah Regional Bruto .
- BPS Kabupaten Klaten 2001. Pendapatan Daerah regional Bruto.
- Edi Suandi hamid – Mb Hendrianto, 1997, Telaah pembangunan Ekonomi
Indonesia, ASSN 1410- 2641
- Fuad Asaddin dan Faried Wijaya Mansor, 2001, Pertumbuhan ekonomi dan
kesempatan kerja : terapan model kebijakan prioritas sektoral untuk
kalimantan timur, jurnal Riset dan Akutansi , manajemen dan Ekonomi
Vol. 1 No. 1 , 2001, 89-103
- Glasson John , 1974, An Introduction to regional planning, Hutchinson of
London.
- Gujarati, Damodar, 1999, Ekonometrika Dasar, (alih bahasa Drs. Ak. Sumarmo
Zain MBA) Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hairul Aswandi , Mudrajad Kuncoro , 2002, “Evaluasi penetapan kawasan
andalan : Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993 – 1999 “ Jurnal
Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 17 . No. 1 , 2002, 27 – 45
- Haynes, E. Kisngley and Mustafa Dinc, 1997, Prodictivity Change in
Manufacturing Regions : A. Multifactor/Shift – share Approach, gromth
and change, Spring. 201-221
- Hg. Suseno Triyanto Widodo , 1990, Indikator Ekonomi Dasar perhitungan
perekonomian Indonesia, Penerbit Kanisius Yogyakarta.

- Ira Setiati, 1996, Pengaruh penggunaan variable demographi dalam model pertumbuhan ekonomi : kasus 25 Propinsi di Indonesia , 1983 – 1992, Jurnal Ekonomi dan keuangan Indonesia Vol. XLIV no. 2 ,1996,121-159
- Kunarjo, 1996, Perencanaan dan pembiayaan pembangunan, Edisi 3, UI Press, Jakarta
- Latif Adam, 1994 . Aplikasi model shift- share analysis di Propinsi Sulawesi Utara , Jurnal Ekonomi dan Pembangunan , Vol II No. I The Indonesian institute of sciences (PEP_ LIPI) Jakarta.
- Lincoln Arsyad, 1999 Pengantar perencanaan dan pembangunan Ekonomi daerah, Edisi pertama, BPFE- Yogyakarta
- Mudrajad Kuncoro, 2001, Metode Kuantitatif , Teori untuk Bisnis dan Ekonomi, Unit penerbit dan percetakan AMP YKPN, Jokjakarta
- Paul Sitohang, 1997, Dasar- dasar Ilmu Ekonomi Regional, Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.Jakarta.
- Prasetyo Soepono, 1993, Analisis shift share perkembangan dan penerapan, Jurnal ekonomim dan bisnis No. 2 tahun II , FE UGM Yogyakarta.
- Prasetyo Soepono, 2001, Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (Eksport) Posisi dan Sumbangannya Bagi Perbendaharaan alat- alat Analisis Regional, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol 16, No. 1, 2001, 41 – 53
- Rahwati Sri Lestari , 2001, Analisis pengembangan wilayah dan sektor potensial di kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, program sarjana ekstensi fakultas ekonomi Universitas Diponegoro.
- Richadson Harry. W, 1977, Dasar - dasar Ilmu Ekonomi Pembangunan(diterjemahkan Paul Sitohang) , Penerbit Lembaga FE UI, Jakarta.
- Sadono Sukirno, 1985, Ekonomi Pembangunan (proses, masalah dan dasar kebijaksanaan, Lembaga penerbit fakultas ekonomi UI dengan Bima Grafika , Jakarta.
- Sjafrizal, 1997, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, prisma, LP3ES, No.3 Jakarta.

Todaro,P Michael,1997, Economic Development, Six Edition , Edinbourg Gate Harlow: Addison Wesley Longman Limted, New York University.

Yuliana Yuvita Ning Rahwati, 2000, Pertumbuhan dan Perubahan Ekonomi Regional di Jawa Tenga periode 1985 – 1996, Thesis S2, Program pasca sarjana UGM (Tidak dipublikasikan), Jokjakarta.